

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2017



<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2017



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

ISSN : 2477- 0817

Nomor Publikasi : 13550.1806

Katalog BPS : 9199007.13

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman : xii + 115

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penyunting :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit :

Dinamika perekonomian

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak oleh : CV Graphic Dwipa (Cetakan I)

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Dr. Ir. Sukardi, M.Si

Penyunting : Hefinanur, SE
Ichsan, S.ST
Lidya Sri Yeni, S.Si, M.Si
Sumi Lestari S.Si

Penulis : Nilham, SE
Sedwivia Ridena, S.ST
Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si
Nurwinda Anggun Primaharti, S.Si
Muhammad Kanzu Satrio, S.ST

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2017	4
1.3. Cakupan Laporan	6
2. Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat	7
2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	9
2.2. PDRB Menurut Pengeluaran	14
2.3. PDRB Perkapita	16
2.4. Inflasi	17
2.5. Ekspor dan Impor	20
2.6. Penanaman Modal	22
2.7. Kunjungan Wisatawan Mancanegara	24
3. Perkembangan Harga-Harga	27
3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang	29
3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2013 – 2017	34
3.3. Laju Inflasi di Pedesaan	37
4. Ekspor dan Impor	39
4.1. Ekspor	44
4.2. Impor	53
4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat	57
5. Keuangan Daerah	61
5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	63

5.1.1. Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	64
5.1.2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	66
5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68
6. Perbankan	73
6.1. Struktur Perbankan	76
6.2. Penghimpunan Dana Bank	78
6.3. Posisi Kredit Perbankan	79
6.3.1. Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan.....	79
6.3.2. Posisi Kredit Menurut Kelompok Bank.....	82
6.3.3. Posisi Kredit Menurut Lapangan Usaha.....	83
6.3.4. Posisi Kredit Menurut Sektor Ekonomi.....	85
7. Penduduk	87
7.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	91
7.2. Pendidikan	93
7.3. Ketenagakerjaan	95
7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	98
7.5. Kesejahteraan Masyarakat	100
7.5.1. Pola Konsumsi Masyarakat.....	100
7.5.2. Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan	101
8. Penutup	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2017 (persen)..	10
Tabel 2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran 2016 – 2017 (persen)	15
Tabel 2.3.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2017	17
Tabel 2.4.1 Laju Inflasi Kota Padang, 2009 – 2017 (persen)	18
Tabel 2.4.2 Inflasi Bulanan Kota Padang, 2014– 2017 (persen).....	20
Tabel 2.5.1 Perkembangan Ekspor - Impor Provinsi Sumatera Barat 2013 - 2017 (juta US \$)	21
Tabel 2.6.1 Rencana Investasi PMDN dan PMA yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2016 – 2017	24
Tabel 2.6.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2013 – 2017	25
Tabel 3.1.1 Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, Tahun 2015 – 2017 (tahun dasar 2012 = 100).	30
Tabel 3.1.2 Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dan Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2017 (2012 = 100)	32
Tabel 3.1.3 Laju Inflasi Kota Padang 2015 – 2017	34
Tabel 3.2. Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat, 2013 – 2017 (2007=100 dan 2002 = 100).....	36
Tabel 4.1.1 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Komoditi, 2016 – 2017	48
Tabel 4.1.2 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2016 – 2017	52

Tabel 4.2.1	Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2008 – 2017	54
Tabel 4.2.2	Volume Impor Sumatera Barat Menurut Barang 1 Digit STIC, 2013-2017 (ton).....	56
Tabel 4.2.3	Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC, 2013 – 2017 (000 US\$).....	57
Tabel 4.3.1	Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2013-2017 (000 US \$)	58
Tabel 5.1.2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun, 2016 – 2017 (rupiah)	67
Tabel 5.2.1	Ringkasan APBD Kabupaten/Kota menurut Sumber Penerimaan Tahun 2017 (Rupiah).....	69
Tabel 5.2.2	Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 – 2017 (rupiah)	71
Tabel 6.1.1	Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2015-2017	77
Tabel 6.2.1	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Sumatera Barat, 2015-2017 (juta rupiah)	78
Tabel 6.3.1	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing menurut Jenis Penggunaan di Sumatera Barat, 2015–2017 (juta rupiah)....	81
Tabel 6.3.2	Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Diberikan Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat, 2015-2017 (jutaan rupiah).....	83
Tabel 6.3.3	Posisi Pinjaman yang diberikan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Lapangan usaha di Sumatera Barat, 2016 – 2017 (juta rupiah).....	84
Tabel 6.3.4	Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2015 – 2017 (juta rupiah)	86
Tabel 7.0.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2010 – 2017	91
Tabel 7.1.1	Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2017	93

Tabel 7.2.1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2015 – 2017 (persen).....	94
Tabel 7.3.1	Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 – 2017	96
Tabel 7.3.2	Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 – 2017 (000 orang)	97
Tabel 7.4.1	Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	99
Tabel 7.5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat, Tahun 2016 dan 2017	101
Tabel 7.5.2.1	Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2010-2017	103
Tabel 7.5.2.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2012-2017 (rupiah/kapita/bulan).....	106
Tabel 7.5.2.3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2010 – 2017	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat, 2016 – 2017... ..	12
Gambar 2.1.2 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, 2016 – 2017	13
Gambar 2.2.1 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran, 2016 – 2017	16
Gambar 4.1.1 Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Utama Hasil Industri Pertanian, dan Pertambangan di Sumatera Barat, Tahun 2017	47
Gambar 4.1.2 Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Utama Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, Tahun 2017	51
Gambar 4.2.1 Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC Tahun 2017.....	56
Gambar 4.3.1 Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2013 – 2017 (000 US\$).....	59

Kata Pengantar

Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2017 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Dalam publikasi ini akan didapatkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian Sumatera Barat berdasarkan data tahun terakhir.

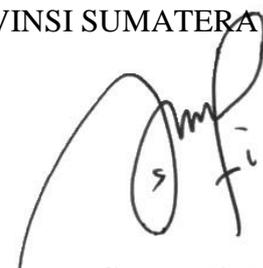
Pada Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2017 terdapat informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi, harga-harga, perdagangan luar negeri, moneter, penanaman modal, kunjungan wisatawan dan perkembangan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini mungkin masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Padang, September 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

1

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG



GAMBARAN EKONOMI

SUMATERA BARAT TAHUN

2017



CAKUPAN LAPORAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi ekonomi global yang kondusif serta makroekonomi yang terjaga memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Pemulihan perekonomian global pada 2017 terus berjalan membaik baik di negara berkembang maupun di negara maju. Ekonomi dunia pada 2017 menggeliat secara signifikan karena mampu tumbuh 3,7 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global di topang oleh pemulihan ekonomi negara maju dan berlanjutnya pemulihan di negara berkembang. Pertumbuhan yang sebelumnya terfokus pada konsumsi mulai meluas ke investasi. Pertumbuhan investasi mendorong perdagangan dunia. Meningkatnya volume perdagangan telah mendorong naiknya harga komoditas terutama komoditas energi dan logam. Perbaikan ekonomi secara global memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia 2017 meningkat ditopang struktur perekonomian yang membaik seta

tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang semakin menurun.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh berlanjut secara gradual yang didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,03 persen tahun 2016 menjadi 5,07 persen tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di topang oleh peningkatan ekspor berbasis komoditas dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak upaya meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai impor. Sementara diperlukan untuk menjamin *supply* barang dan jasa yang dibutuhkan domestik serta demi memacu perekonomian nasional. Di sisi lain peningkatan ekspor juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif dan dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan. Kondisi perekonomian dunia sudah

mulai membaik. Hal ini akan mendorong kinerja ekspor Indonesia karena membaiknya harga komoditas energi dan logam .

Sampai saat ini pemulihan perekonomian global pada 2017 juga telah mempengaruhi perubahan pola pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang mulai membaik mengikuti pertumbuhan ekonomi negara maju memasuki pemulihan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya Tiongkok pertumbuhannya tetap tinggi yang didorong permintaan eksternal dan konsumsi yang tetap kuat. Kenaikan pertumbuhan di negara eksportir komoditas ini berdampak positif pada negara-negara pengekspor komoditas, termasuk Indonesia. Kinerja ekspor semakin membaik sejalan dengan permintaan global yang semakin meningkat.

Menurut Bank Indonesia tahun 2017 perekonomian Indonesia terus membaik yang didukung momentum positif baik global maupun domestik. Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan terjaga sementara

momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Terjaganya stabilitas makro ekonomi tercermin pada inflasi cukup rendah di level 3,61 persen, melanjutkan capaian tahun 2015 yang berada dalam rentang sarannya $4,0\pm 1$ persen. Inflasi yang rendah dipengaruhi harga komoditas yang masih rendah, nilai tukar yang terkendali dan permintaan agregat yang terkelola dengan baik.

Pencapaian kinerja ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong proses pemulihan perekonomian.

1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah

seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat tahun 2017 secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Perkembangan ekonomi membaik dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun global. Perkembangan perekonomian Sumatera Barat sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 tercatat sebesar 155,96 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,27 persen. Dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku sebesar 214,58 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 196,44 triliun rupiah. Sementara itu

nilai PDRB tahun 2016 atas dasar arga konstan sebesar 148,13 triliun rupiah.

Seperti halnya dengan tahun 2016, pada tahun 2017 seluruh sektor ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan sektor yang merupakan kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor pertanian.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 juga dipengaruhi antara lain oleh peningkatan ekspor industri yang berbasis komoditas pertanian. Hal ini menyebabkan pendapatan rumah-tangga pertanian terutamanya perkebunan mengalami perbaikan. Selanjutnya peningkatan pendapatan ini memicu naiknya konsumsi rumah-tangga. Hal ini berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan dan permintaan akan barang hasil industri. Sektor pendidikan, Penyediaan Akomodasi dan Informasi dan Komunikasi juga menunjukkan peningkatan.

1.3. Cakupan Laporan

Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2017 menyajikan informasi perkembangan indikator-indikator perekonomian yang menggambarkan kemajuan ekonomi secara umum. Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam 7 bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan kondisi perekonomian secara umum. Dalam Bab II terdapat perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor dan lain-lain. Bab III menampilkan perkembangan harga-harga yang meliputi perkem-

bangun Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi di Kota Padang. Perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor serta neraca perdagangan ditampilkan pada Bab IV. Bab V menyajikan perkembangan keuangan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Data perbankan yang meliputi struktur perbankan, penghimpunan dana dan posisi kredit perbankan terdapat pada Bab VI. Pada Bab VII diuraikan mengenai perkembangan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir Bab VIII adalah penutup.

2

TINJAUAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA BARAT

- 👉 **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**
- 👉 **PDRB MENURUT PENGELUARAN**
- 👉 **PDRB PERKAPITA**
- 👉 **INFLASI**
- 👉 **EKSPOR DAN IMPOR**
- 👉 **PENANAMAN MODAL**
- 👉 **KUNJUNGAN WISATA MANCANEGARA**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit.

Penghitungan PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1. PDRB Menurut Lapangan

Usaha

PDRB menurut lapangan usaha merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Mulai tahun 2010 PDRB menurut lapangan usaha ini dirinci atas 17 (tujuh belas) kategori.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat di tahun 2017 tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan PDRB yang tercipta yakni sebesar 5,29 persen. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,07 persen di tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2017 tersebut di bawah kisaran target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu sebesar 5,3 -5,7 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional juga di bawah target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yaitu sebesar 5,2 persen.

Tabel 2.1.1
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2016 – 2017 (persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi PDRB ²⁾	
	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,01	3,40	24,02	23,55
B Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	4,52	4,26
C Industri Pengolahan	4,90	2,26	10,08	9,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,94	4,06	0,11	0,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	6,40	3,96	0,09	0,09
F Konstruksi	6,59	7,23	9,27	9,32
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	14,87	15,05
H Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,10	12,45	12,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	1,31	1,35
J Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	4,99	5,28
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	3,17	3,09
L Real Estate	5,37	4,49	2,00	1,97
M,N Jasa Perusahaan	4,94	5,19	0,43	0,43
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,96	4,49	5,82	5,85
P Jasa Pendidikan	7,85	9,94	3,84	4,13
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	1,27	1,33
R,S, T,U Jasa Lainnya	9,35	7,95	1,77	1,84
PDRB	5,27	5,29	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

¹⁾ Atas Dasar Harga Konstan 2010

²⁾ Atas Dasar Harga Berlaku

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bila ditelaah lebih lanjut, 17 kategori penyusun PDRB menurut lapangan usaha ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 dicapai oleh kategori Jasa

Pendidikan yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,94 persen. Selanjutnya, laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar 8,76 persen dan laju pertumbuhan tertinggi ketiga yaitu

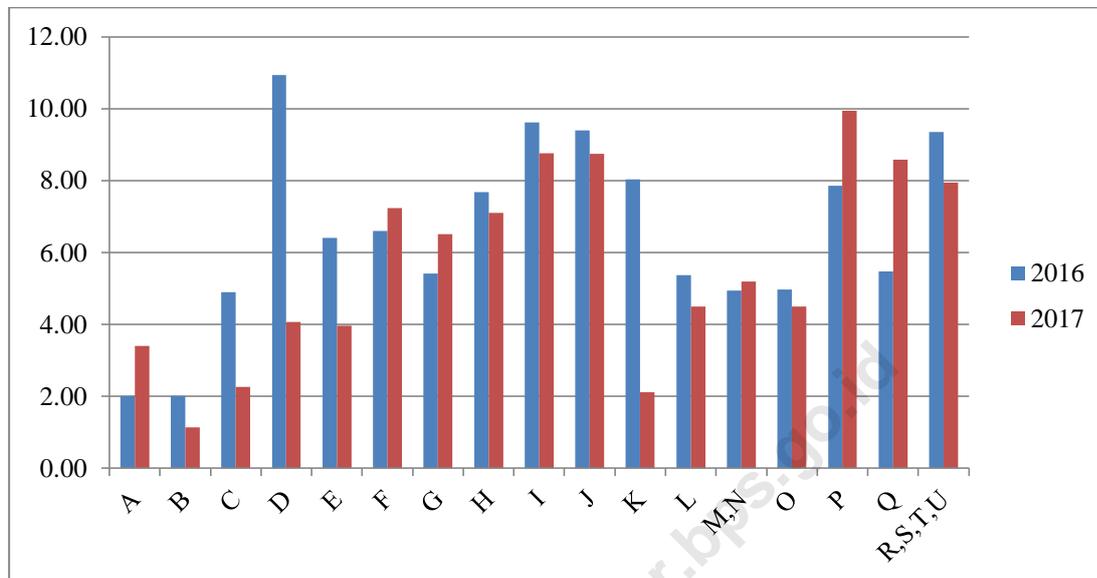
kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,74 persen. Beda halnya dengan kategori Jasa Pendidikan yang tumbuh positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi yang menempati urutan laju pertumbuhan tertinggi kedua dan ketiga di tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016, kategori ini justru tumbuh lebih lambat.

Dari 17 kategori penyusun PDRB menurut lapangan usaha, ada 6 kategori yang tumbuh positif yakni kategori Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sekitar 11 kategori yang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu Pertambangan dan Pengalihan;

Industri Pengolahan ; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Di tahun 2017, kategori pertanian masih merupakan kategori yang mempunyai peranan penting di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi kategori tersebut terhadap pembentukan PDRB di tahun 2017 yang mencapai 23,55 persen. Kontribusi kategori pertanian sedikit menurun dibanding tahun 2016 yang berada pada angka 24,02 persen. Penurunan kontribusi kategori pertanian terhadap pembentukan PDRB berbanding terbalik dengan laju pertumbuhannya yang naik dari 2,01 persen di tahun 2016 menjadi 3,40 persen tahun 2017.

Gambar 2.1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat, 2016-2017



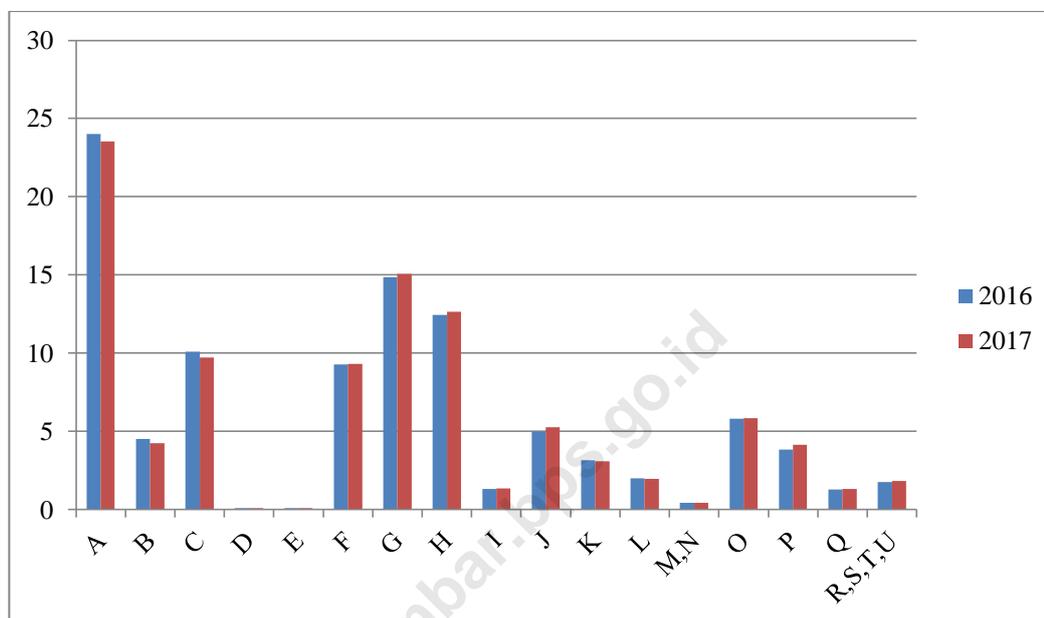
Keterangan :

- | | |
|---|--|
| A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan | J. Informasi dan Komunikasi |
| B. Pertambangan dan penggalian | K. Jasa Keuangan dan asuransi |
| C. Industri pengolahan | L. Real estate |
| D. Pengadaan listrik dan gas | M,N. Jasa Perusahaan |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial |
| F. Konstruksi | P. Jasa Pendidikan |
| G. Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor | Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
| H. Transportasi dan pergudangan | R,S,T,U. Jasa lainnya |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | |

Kategori berikutnya yang mempunyai andil yang juga besar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat adalah kategori G (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). Pada tahun 2017 sebesar 15,05 persen PDRB Provinsi Sumatera Barat berasal dari kategori ini, meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat

sebesar 14,87 persen. Suku Minang yang merupakan etnis mayoritas di Provinsi Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai saudagar yang tangguh, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat, dan hasilnya terlihat dari masih cukup besarnya sumbangan kategori G dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.1.2
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2016– 2017



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan | J. Informasi dan Komunikasi |
| B. Pertambangan dan penggalan | K. Jasa Keuangan dan asuransi |
| C. Industri pengolahan | L. Real estate |
| D. Pengadaan listrik dan gas | M,N. Jasa Perusahaan |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial |
| F. Konstruksi | P. Jasa Pendidikan |
| G. Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor | Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
| H. Transportasi dan pergudangan | R,S,T,U. Jasa lainnya |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | |

Sementara itu kategori H atau kategori Transportasi dan Pergudangan mulai memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 kategori ini menyumbang 12,45 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi

12,64 persen. Selanjutnya Kategori C memberikan sumbangan ke empat terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 9,71 persen di tahun 2017.

Dilain hal, kategori yang paling kecil peranannya adalah kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) yang hanya

memberikan sumbangan 0,09 persen dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat baik tahun 2016 maupun 2017.

2.2 PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor bersih (ekspor-impor) dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan setiap komponen penyusun tumbuh positif kecuali pengeluaran konsumsi pemerintahan yang berkontraksi sebesar 0,80 persen. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut pengeluaran yang paling besar adalah ekspor luar negeri yaitu sebesar 6,56 persen. Komponen yang memiliki laju pertumbuhan yang juga tinggi atau berada pada urutan kedua dicatat oleh pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan laju pertumbuhan sebesar 4,70 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan LNPRT sebesar 4,36 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah 4,31 persen.

Dilihat dari distribusi PDRB menurut pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga masih merupakan yang utama dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat menurut pengeluaran. Pada tahun 2017 komponen ini memberikan andil sebesar 52,50 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini terdiri atas semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau afkiran.

Komponen yang mempunyai distribusi yang juga cukup besar setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah PMTB. Pada tahun 2016 andilnya sudah mencapai 30,35 persen. Namun pada tahun 2017 komponen PMTB ini mengalami sedikit penurunan dalam distribusi

PDRB dan tercatat menjadi 29,93 persen.

Sementara itu distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2017 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,27 persen, turun menjadi 12,68 persen di tahun 2017. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini merupakan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari

pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, tidak termasuk atau dikurangi dengan hasil penjualan (penerimaan) dari produksi barang dan jasa (output pasar) yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah (yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah) tetapi dikonsumsi oleh masyarakat (bukan pemerintah). Sedangkan distribusi paling rendah di tahun 2017 terdapat pada komponen pengeluaran LNPR yang sebesar 1,05 persen.

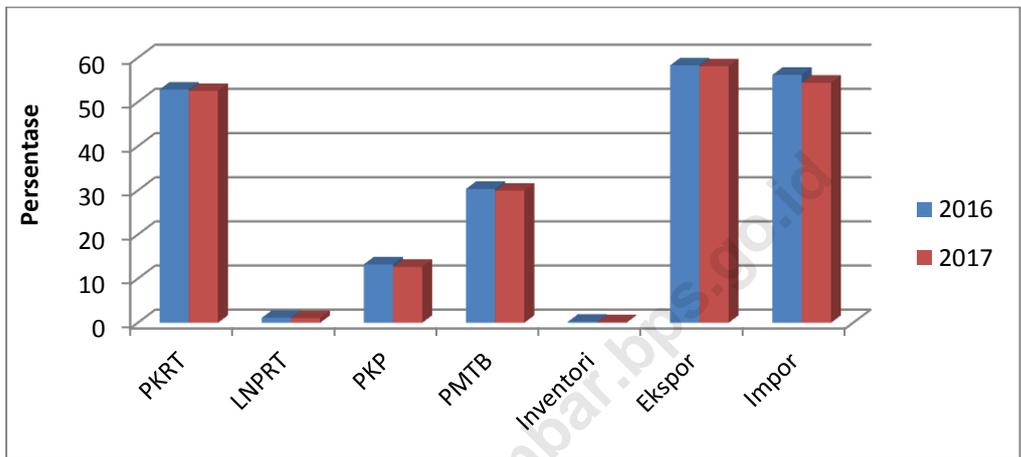
Tabel 2.2.1
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB
Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran
2016 - 2017 (Persen)

Komponen	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi ²⁾	
	2016*	2017**	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,39	4,70	52,84	52,50
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	4,67	4,36	1,12	1,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,02	-0,80	13,27	12,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,31	4,31	30,35	29,93
5. Perubahan Stok	-2,34	-37,15	0,26	0,15
6. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	1,55	6,56	58,31	58,07
7. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	-0,11	4,12	56,15	54,37

PDRB	5,27	5,29	100,00	100,00
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
 Keterangan : *) Angka Sementara ¹⁾ ADHK 2010
 **) Angka Sangat Sementara ²⁾ ADHB

Gambar 2.2.1
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat,
Menurut Pengeluaran 2016 – 2017 (Persen)



2.3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dari penghitungan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk.

Pada tahun 2017 PDRB per kapita menurut harga berlaku Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 40,32 juta rupiah. PDRB pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,96 persen dibanding dengan kondisi tahun 2016 dengan PDRB per kapita tercatat sebesar 37,35 juta rupiah.

Tabel 2.3.1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2017.

Uraian	Tahun	Nilai Nominal (rupiah)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita	2013	28.994.478,59	-
	2014	32.141.085,24	10,85
	2015	34.630.864,51	7,75
	2016 *)	37.349.917,15	7,85
	2017 **)	40.324.283,16	7,96

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Apabila dilihat selama lima tahun terakhir ini, PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kenaikan PDRB per kapita adalah 10,85 persen. Kenaikan PDRB per kapita pada tahun 2015 melambat menjadi 7,75 persen dan kembali naik menjadi 7,85 persen di tahun 2016.

2.4. Inflasi

Angka inflasi di Kota Padang pada tahun 2017 adalah sebesar 2,11 persen. Angka inflasi Kota Padang ini lebih rendah dibanding angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 3,61 persen. Inflasi Kota

Padang di tahun 2017 lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 5,02 persen.

Tabel 2.4.1
Laju Inflasi Kota Padang 2008-2016
(persen)

Tahun	Inflasi
(1)	(2)
2008	12,68
2009	2,05
2010	7,84
2011	5,37
2012	4,16
2013	10,87
2014	11,90
2015	0,85
2016	5,02
2017	2,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Selama periode tahun 2008-2017 inflasi di Kota Padang sangat fluktuatif. Inflasi tahun 2015 merupakan yang terendah semenjak tahun 2008. Pada tahun 2008, 2013 dan 2014 inflasi di Kota Padang mencapai angka dua digit, yaitu sebesar 12,68 persen, 10,87 persen dan 11,90 persen. Di tahun 2017 inflasi kota Padang sebesar 2,11. Bila diperhatikan andil selama tahun 2017,

di Kota Padang, 6 (enam) kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,79 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 7,18 persen; kelompok sandang sebesar 4,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,23 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 4,61 persen; dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,03. Beda halnya dengan kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi dengan angka -4,56 persen.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok, melalui perbaikan manajemen stok, operasi pasar dan perbaikan infrastruktur untuk memitigasi dampak banjir yang dapat menghambat distribusi bahan pangan. Koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang cukup intens.

Ada tiga penyebab yang bisa memengaruhi naik atau turunnya inflasi, yaitu pertama *demand full inflation* karena besarnya permintaan yang biasanya terjadi pada bulan puasa (bulan Ramadhan), Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kedua, *cost push inflation* yang terjadi karena adanya kelangkaan produksi dan kenaikan harga input produksi. Ketiga, *imported inflation* yang berasal dari luar negeri. Seperti kenaikan barang impor yang menyebabkan barang yang ada di dalam negeri juga mengalami peningkatan. Jika tidak ada gangguan *cost push inflation* dan *imported inflation*, maka kenaikan tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi.

Selama ini inflasi yang tinggi sering terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah (*administered price*) dalam menurunkan subsidi seperti pada bahan bakar minyak (BBM), sehingga harga BBM menjadi naik. Kenaikan harga BBM ini sangat memengaruhi harga barang dan jasa

lainnya, dan secara otomatis inflasi juga menjadi tinggi.

Sebaliknya penurunan angka inflasi seperti yang terjadi pada tahun 2017 ini mengindikasikan berhasilnya TPID Sumatera Barat menekan pergerakan harga komoditas pokok yang rentan bergejolak

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa inflasi bulanan di Kota Padang sangat fluktuatif. Ada bulan-bulan yang mengalami inflasi namun ada juga yang mengalami deflasi. Selama periode tahun 2012 sampai 2017 ini inflasi bulanan juga diiringi dengan bulan-bulan yang mengalami deflasi. Pada tahun 2013 hanya satu bulan yang deflasi yaitu bulan September. Selanjutnya di tahun 2014 ada tiga bulan yang mengalami deflasi, yaitu di bulan Februari, Maret dan April, pada tahun 2015 empat bulan yang mengalami deflasi, yaitu Januari, Februari, September dan Oktober, di tahun 2016 ada dua bulan yang deflasi yaitu bulan April dan Mei dan pada tahun 2017 deflasi terjadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Agustus.

Deflasi merupakan keadaan sebaliknya dari inflasi, yaitu secara umum harga barang dan jasa justru mengalami penurunan. Deflasi nasional dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertama, deflasi nasional dapat menjadi faktor penahan untuk kenaikan suku bunga nasional. Selain itu, deflasi juga dapat menurunkan biaya pembelian bahan baku untuk industri pengolahan. Namun, deflasi juga dapat menaikkan konsumsi masyarakat karena harga yang lebih murah.

Inflasi yang terjadi di tahun 2017 dilihat per bulannya relatif lebih rendah berada di bawah satu persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 0,72 persen. Hal ini disebabkan karena adanya perayaan hari natal dan tahun baru serta liburan sekolah.

Tabel 2.4.2
Inflasi Bulanan Kota Padang, 2013-2017 (persen)

Bulan	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2015 ^{**)}	2016 ^{**)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Januari	1,19	1,89	-1,98	0,02	0,57
Februari	0,70	-0,64	-2,07	0,86	-0,13
Maret	0,31	-0,39	0,01	0,55	-0,01
April	0,58	-0,09	0,56	-0,92	-0,31
Mei	0,69	0,05	0,65	-0,37	-0,04
Juni	1,45	0,31	0,83	0,10	0,34
Juli	2,43	0,81	1,21	1,52	0,54
Agustus	0,89	1,83	0,38	0,84	-0,36
September	-0,05	0,33	-0,49	0,58	0,13
Oktober	0,77	1,18	-0,44	0,56	0,19
November	0,46	3,44	0,47	1,13	0,48
Desember	0,50	2,66	1,79	0,07	0,72

Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Padang 2007 – 2017

Catatan : ^{*)} Tahun dasar 2007 = 100

^{**)} Tahun dasar 2012 = 100

2.5. Ekspor dan Impor

Sejak tahun 2012-2016 ekspor dan impor menunjukkan penurunan yang cukup signifikan namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2017. Tajamnya persaingan global dalam perdagangan internasional dan semakin ketatnya standar kualitas beberapa komoditi ekspor Indonesia yang ditetapkan di beberapa negara mitra dagang menjadi permasalahan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah tetap berupaya untuk merumuskan kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi guna menunjang dan meningkatkan kelancaran arus barang dengan membuat aturan yang mempermudah para eksportir dalam mengurus birokrasi kepabeanan yang selama ini mempersulit prosedur komoditi ekspor ke luar negeri dan juga menjadi fasilitator dalam mencari pasar

internasional bagi produk dalam negeri.

Selain kebijakan ekspor, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dibidang impor yaitu dengan mengupayakan untuk tetap menunjang serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Untuk mendorong kegiatan industri pengolahan, pemerintah mulai mengatur tata cara impor mesin dan peralatan mesin bukan baru dengan menetapkan kriteria mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor dan ketentuan mengenai uji kelaikan barang impor tersebut. Disamping itu kebijakan impor juga ditujukan untuk tetap menjaga tersedianya kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatkan pendayagunaan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Tabel 2.5.1
Perkembangan Ekspor – Impor
Provinsi Sumatera Barat 2013-2017 (Juta US \$)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Ekspor	2 209,01	2 105,61	1 748,01	1 708,28	2 046,27

Impor	1 035,00	1 034,61	632,80	345,25	446,26
-------	----------	----------	--------	--------	--------

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2013 ekspor sebesar 2,21 milyar US \$ dengan impor 1,04 milyar US \$, neraca perdagangan pada tahun ini sebesar 1,17 miliar US \$. Selanjutnya pada tahun 2014 ekspor tercatat sebanyak 2,11 miliar US \$ dan impor sebesar 1,03 miliar US \$.

Penurunan ekspor ini terjadi karena tidak menentunya kondisi perekonomian negara tujuan ekspor sehingga permintaan akan komoditi yang merupakan produk unggulan Provinsi Sumatera Barat juga berkurang. Tahun 2015 ekspor tercatat sebanyak 1,75 miliar US \$ dan impor sebesar 0,63 miliar US \$. Sehingga neraca perdagangan tahun 2015 adalah 1,11 miliar US \$. Di Tahun 2016 nilai ekspor kembali turun menjadi 1,71 miliar US \$ dan impor sebesar 0,35 miliar US \$, sehingga neraca perdagangan tahun 2016 adalah 1,36 miliar US \$ dan di tahun 2017 nilai ekspor sebesar 2,05 miliar US \$ dan impor sebesar 0,45 miliar US \$ dengan neraca perdangan sebesar 1,60 miliar US \$. Neraca perdagangan yang

merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor Sumatera Barat dari tahun 2013-2017 menunjukkan nilai yang positif artinya terjadi surplus pada perdagangan.

2.6. Penanaman Modal

Minat investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya bertambah sangat signifikan.

Persetujuan investasi yang diberikan oleh DPM kepada investor dalam negeri pada tahun 2017 adalah senilai 22,89 miliar rupiah. Nilai investasi di tahun tersebut meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 10,88 miliar rupiah (meningkat 110,50 persen). Sedangkan untuk nilai rencana investasi asing di tahun 2017 tercatat sebesar 0,43 miliar US \$, naik

dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 0,26 miliar US \$.

Kategori yang telah mendapat persetujuan tetap dalam rencana investasi oleh PMDN di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 terdiri dari delapan kategori. Delapan kategori yang diminati investor dalam negeri itu adalah kategori pertanian, kategori pertambangan dan penggalan, kategori industri pengolahan, kategori listrik, gas kategori bangunan, kategori perdagangan, hotel dan restoran, kategori pengangkutan dan telekomunikasi, serta kategori jasa-jasa.

Kategori yang paling besar rencana nilai investasi dari PMDN pada tahun 2017 adalah kategori listrik, gas dan air bersih. Pada tahun tersebut telah disetujui investasi sebesar 20,92 triliun rupiah. Namun demikian, dibanding tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan rencana investasi oleh investor dalam

negeri, karena pada tahun 2016 terdapat 7,39 miliar rupiah yang akan diinvestasikan oleh investor dalam negeri ke kategori ini. Pada urutan kedua adalah kategori pertanian yang telah disetujui investasi sebesar 1,26 miliar rupiah, namun tahun 2016 yang nilai investasi kategori masih kecil yaitu 0,01 miliar.

Minat investor asing menanamkan modal pada tahun 2017 naik dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 telah disetujui investasi oleh pihak asing sebesar 0,26 milyar US \$, sedangkan pada tahun 2017 disetujui rencana investasi sebesar 0,44 miliar US \$. Tahun 2016 kategori industri pengolahan yang menempati posisi utama dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan nilai 84,31 juta US \$. Namun, di tahun 2017 investor asing lebih tertarik menanamkan modalnya pada kategori listrik, gas, dan air bersih sebesar 253,29 juta US \$.

Tabel 2.6.1
Rencana Investasi PMDN dan PMA yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2017

Lapangan Usaha		2016		2017	
		PMDN	PMA	PMDN	PMA
		(ribu Rupiah)	(ribu US \$)	(ribu Rupiah)	(ribu US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	10 170,00	1 000,00	1 261 942,00	14 000
2	Pertambangan dan Penggalian	48 090,00	71 950,00	36 125,00	3 896,79
3	Industri Pengolahan	3 072 035,87	84 310,70	322 956,00	6 063,75
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7 390 751,29	52 455,27	20 924 271,10	253 292,39
5	Bangunan	81 722,37		64 778,65	25 761,56
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	91 293,29	15 485,51	165 149,99	123 425,18
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	14 826,10	1 038,46	1 000,00	5 000,00
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2 350,00	24 407,41		
9	Jasa-Jasa	165 600,00	6 292,61	119 210,67	6 561,88
Jumlah		10 876 838,92	256 939,96	22 895 433,41	438 001,55

Sumber : BKPM Provinsi Sumatera Barat

2.7. Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Dalam periode tahun 2013–2017 wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, dan 2014 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 48.710 dan 56.111 orang. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan menjadi 48.755 orang dan

kembali naik menjadi 49.686 orang pada tahun 2016. Selanjutnya, di tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan 13,34 persen yakni sebanyak 56.313 orang. Peningkatan ini terjadi seiring dengan perbaikan objek wisata serta sarana pendukung dan pembukaan wahana baru yang menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung.

Tabel 2.6.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2013 – 2017 (orang)

Tahun	Wisatawan Mancanegara
(1)	(2)
2013	48 710
2014	56 111
2015	48 755
2016	49 686
2017	56 313

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

3

PERKEMBANGAN HARGA-HARGA

- 👉 **PERKEMBANGAN IHK DAN LAJU INFLASI KOTA PADANG**
- 👉 **HARGA PRODUSEN DI TINGKAT PETANI DAN NILAI TUKAR PETANI**
- 👉 **LAJU INFLASI DI PEDESAAN**

Perkembangan harga-harga yang terjadi dapat dilihat dari angka inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sedangkan secara luas inflasi dapat juga berarti melemahnya nilai mata uang yang disebabkan meningkatnya harga barang-barang di pasaran.

Di bidang harga, pemerintah secara bertahap melanjutkan penyesuaian harga sejumlah barang pada harga pasarnya. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan antara lain diarahkan untuk mempertahankan daya beli sebagian masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang turut memengaruhi laju inflasi seperti adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga *liquefied petroleum gas* (LPG), kenaikan harga air perusahaan air minum (PAM) dan kebijakan lainnya seperti menaikkan tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon ataupun

kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) juga dapat memacu laju inflasi.

3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang

Penghitungan indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan dasar penghitungan inflasi diperoleh dari hasil pengolahan data harga konsumen (HK). Mulai Januari 2014, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012=100 dan mencakup 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 49 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007=100 dan hanya mencakup 66 kota. Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari mencakup antara 225 atau 462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok dan dalam setiap sub kelompok

terdapat beberapa komoditas, lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Hasil penghitungan IHK umum di Kota Padang pada periode tahun 2015 sampai 2017 setiap bulannya berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, IHK mengalami fluktuasi, yang dimulai

dari angka IHK 123,54 di bulan Januari, pada bulan Februari mengalami penurunan, bulan Maret sampai dengan Agustus selalu meningkat, bulan September-Oktober menurun, dan bulan November-Desember meningkat. Pada bulan Desember mencapai angka tertinggi, yaitu 127,10.

Tabel. 3.1.1
Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, Tahun 2015 – 2017
Tahun Dasar 2012 = 100

Bulan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	123,54	127,12	134,24
Februari	120,98	128,21	134,06
Maret	120,99	128,91	134,04
April	121,67	127,72	133,62
Mei	122,46	127,25	133,56
Juni	123,48	127,38	134,01
Juli	124,97	129,32	134,73
Agustus	125,44	130,40	134,25
September	124,83	131,16	134,43
Oktober	124,28	131,90	134,69
November	124,87	133,39	135,33
Desember	127,10	133,48	136,30

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2016, IHK juga mengalami fluktuasi, yang dimulai

dari angka IHK 127,12 di bulan Januari,

pada bulan Februari mengalami peningkatan hingga bulan Maret dan kembali mengalami penurunan hingga bulan Juni. Dari Agustus sampai Desember IHK mengalami peningkatan mencapai angka tertinggi, yaitu 133,48.

Pada tahun 2017, IHK juga mengalami fluktuasi, yang dimulai dari angka IHK 134,24 di bulan Januari, pada bulan Februari mengalami penurunan hingga bulan Mei dan kembali mengalami peningkatan hingga bulan Juli. Dari Agustus sampai Desember IHK mengalami peningkatan mencapai angka tertinggi, yaitu 136,30 di bulan Desember.

Selanjutnya IHK menurut kelompok pengeluaran (Tabel 3.1.2), IHK terbesar di tahun 2017 terdapat pada kelompok bahan makanan. Pada bulan Januari IHK kelompok bahan makanan ini adalah sebesar 150,19. Namun IHK mengalami penurunan hingga bulan Juli. Pada bulan Agustus

sampai Desember IHK mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi terjadi di bulan Januari dan terendah di bulan Juli yakni 138,56.

Dengan kondisi IHK yang demikian maka di Kota Padang pada kelompok bahan makanan terdapat beberapa bulan yang mengalami deflasi, yaitu Januari hingga Juli. Inflasi terbesar terjadi di bulan Desember dengan angka mencapai 2,13 persen.

Pada awal tahun 2017 kelompok pengeluaran sandang merupakan kelompok pengeluaran yang paling kecil angka IHK-nya. Nilai IHK pada kelompok ini mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding bulan lainnya pada bulan Agustus hingga Desember. IHK terbesar terjadi di bulan November hingga Desember yakni 116,23. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 0,99 dan deflasi terendah terjadi di bulan Juli yakni -0,49.

Tabel 3.1.2
Indeks Harga Konsumen (IHK) , Inflasi, dan Laju Inflasi
Kota Padang Tahun 2017
(2012 = 100)

Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Bahan Makanan			Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau			Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar			Sandang		
	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	150,19	-1,27	-1,27	132,51	1,70	1,7	125,76	0,66	0,66	112,83	0,99	0,99
Februari	147,23	-1,97	-3,21	132,71	0,15	1,86	126,98	0,97	1,63	113,36	0,47	1,47
Maret	147,11	-0,08	-3,29	132,85	0,11	1,96	127,44	0,36	2,00	113,88	0,46	1,93
April	143,11	-2,72	-5,92	132,93	0,06	2,03	129,31	1,47	3,50	114,83	0,83	2,78
Mei	141,93	-0,82	-6,70	132,89	-0,03	2,00	129,98	0,52	4,03	114,47	-0,31	2,46
Juni	141,11	-0,58	-7,24	133,23	0,26	2,26	131,66	1,29	5,38	115,36	0,78	3,26
Juli	138,56	-1,81	-8,91	134,27	0,78	3,05	131,88	0,17	5,55	114,80	-0,49	2,76
Agustus	139,40	0,61	-8,36	134,50	0,17	3,23	131,96	0,06	5,62	115,46	0,57	3,35
September	139,99	0,42	-7,97	134,82	0,24	3,48	131,99	0,02	5,64	116,08	0,54	3,90
Oktober	140,14	0,11	-5,88	135,08	0,19	4,28	132,7	0,54	7,50	116,11	0,03	2,92
November	142,16	1,44	-6,55	135,17	0,07	3,75	132,95	0,19	6,41	116,23	0,10	4,04
Desember	145,19	2,13	-4,56	135,23	0,04	3,79	133,91	0,72	7,18	116,23	0,00	4,04

Lanjutan Tabel 3.1.2

Tahun/ Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Kesehatan			Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga			Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan			Umum		
	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Januari	134,8	2,70	2,7	134,23	0,63	0,63	132,12	1,62	1,62	134,24	0,57	1,62
Februari	135,38	0,43	3,15	134,51	0,21	0,84	133,1	0,74	2,38	134,06	-0,13	2,38
Maret	136,05	0,49	3,66	134,66	0,11	0,95	132,06	-0,78	1,58	134,04	-0,01	1,58
April	136,28	0,17	3,83	134,64	-0,01	0,94	132,56	0,38	1,96	133,62	-0,31	1,96
Mei	136,39	0,08	3,92	134,94	0,22	1,16	133,08	0,39	2,36	133,56	-0,04	2,36
Juni	136,38	-0,01	3,91	134,82	-0,09	1,07	134,14	0,8	3,18	134,01	0,34	3,18
Juli	136,44	0,04	3,95	138,79	2,94	4,05	138,86	3,52	6,81	134,73	0,54	6,81
Agustus	137,51	0,78	4,77	139,36	0,41	4,48	134,01	-3,49	3,08	134,25	-0,36	3,08
September	137,91	0,29	5,07	139,13	-0,17	4,30	133,63	-0,28	2,78	134,43	0,13	2,78
Oktober	138,25	0,25	6,83	139,2	0,05	4,18	133,64	0,01	4,41	134,69	0,19	2,12
November	138,57	0,23	5,58	139,28	0,06	4,42	133,9	0,19	2,99	135,33	0,48	1,39
Desember	138,12	-0,32	5,23	139,54	0,19	4,61	133,95	0,04	3,03	136,3	0,72	2,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2017, perubahan IHK umum di Kota Padang tercatat lima bulan mengalami deflasi dan tujuh bulan mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yakni 0,36 dan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 0,72. Penyumbang inflasi terbesar pada bulan Desember berasal dari kelompok bahan makanan yakni 2,13.

Penghitungan inflasi di Kota Padang merupakan salah satu dari penghitungan di 82 kota di Indonesia yang dijadikan dasar penghitungan angka inflasi nasional. Angka inflasi ini didapatkan dari penghitungan perubahan angka IHK dari suatu waktu ke waktu lainnya, misalnya bulanan ataupun tahunan.

Angka inflasi yang rendah memberi indikasi ke arah yang lebih baik bagi pembangunan negara Indonesia. Inflasi yang rendah akan menyebabkan daya beli masyarakat

menjadi lebih baik sehingga perekonomian akan berjalan makin bergairah. Daya beli yang membaik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin tinggi.

Inflasi yang cukup terkendali merupakan kondisi yang sangat diharapkan. Untuk itu perlu kerjasama dari berbagai pihak misalnya Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Dengan terjaganya inflasi maka akan berpengaruh baik pada berbagai hal, antara lain kemiskinan bisa menjadi lebih rendah, pengangguran berkurang sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih optimal.

Pada tahun 2015, laju inflasi tercatat sebesar 0,85 dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 5,02 dan di tahun 2017 inflasi di Kota Padang kembali turun yakni sebesar 0,58. Nilai inflasi di tahun ini merupakan nilai terkecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.1.3
Laju Inflasi Kota Padang 2015-2017

Kelompok	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)
Umum	0,85	5,02	0,58
Bahan Makanan	-5,20	10,83	-8,36
Makanan Jadi,minuman,rokok dan tembakau	5,49	5,37	3,23
Perumahan	3,96	2,54	5,62
Sandang	2,75	1,64	3,35
Kesehatan	7,75	6,07	4,77
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	9,35	4,82	4,48
Transportasi & komunikasi	-2,40	-0,02	3,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Kelompok bahan makanan menjadi motor penekan nilai inflasi Kota Padang kali ini, tercatat bahwa di tahun 2017 kelompok bahan makanan mengalami deflasi yang cukup besar yakni -8,38 dan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Sedangkan, inflasi terbesar terjadi pada kelompok perumahan yakni sebesar 4,77. Hal ini karena tingginya nilai rupiah yang dikeluarkan untuk Air dan biaya tempat tinggal.

3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2013-2017

Pertanian merupakan sektor yang utama di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hal ini juga tercermin dari sumbangan kategori pertanian setiap tahunnya terhadap PDRB Sumatera Barat merupakan paling besar dibanding kategori lainnya. Pada tahun 2017 sumbangan kategori pertanian ini mencapai 23,55 persen terhadap total

PDRB Sumatera Barat. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa 35,17 persen penduduk Sumatera Barat yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani digunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Mulai bulan Desember tahun 2013 penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012 ($2012 = 100$), sedangkan sebelumnya digunakan tahun dasar 2007 untuk menghitung NTP ($2007 = 100$).

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran perubahan harga-harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima

petani untuk barang-barang hasil produksinya. Dari It ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang diterima petani atau merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum *form gate* atau disebut juga sebagai harga di sawah/ladang setelah pemetikan.

Rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) di Sumatera Barat selama pada tahun 2013–2017 berfluktuasi, walaupun dengan persentase perubahan yang berbeda-beda. Pada tahun 2014 nilai It tercatat sebesar 112,54 atau terjadi penurunan sebesar 25,12 persen dan meningkat di tahun 2015 dengan nilai It sebesar 115,09 dengan perubahan sebesar 2,27 persen. Tahun 2016 nilai It Sumatera Barat kembali naik menjadi 119,62 dengan perubahan sebesar 3,94 persen. Kondisi It kian membaik di tahun 2017 yakni naik sebesar 2,52 persen mencapai 122,64. Semakin besar nilai It akan berdampak baik terhadap kesejahteraan petani.

Tabel 3.2
Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani (It),
Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) Dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sumatera Barat, 2013-2017 (2007 = 100 dan 2012 = 100)

Tahun	It	Perubahan (%)	Ib	Perubahan (%)	NTP	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	150,29	3,38	144,23	4,79	104,21	-0,78
2014	112,54	-25,12	111,85	-22,45	100,66	-3,41
2015*)	115,09	2,27	117,76	5,28	97,74	-2,90
2016*)	119,62	3,94	122,48	4,01	97,67	-0,07
2017*)	122,64	2,52	126,47	3,26	96,97	-0,72

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
 Catatan : *) tahun dasar 2012 = 100

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangganya maupun biaya keperluan produksi pertaniannya. Selama periode tahun 2013-2017 di Sumatera Barat angka Ib menunjukkan kecenderungan yang sama dengan It, yaitu berfluktuasi. Hal ini berarti secara rata-rata harga yang harus dibayar petani untuk barang dan jasa yang diperlukannya juga berfluktuasi.

Pada tahun 2017 angka Ib Sumatera Barat adalah 126,47. Dibanding tahun 2016, telah terjadi perubahan sebesar 3,26 persen.

Nilai tukar petani (NTP) yang didapatkan dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) secara umum menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian umum. Jika nilai NTP yang diperoleh lebih besar dari 100 berarti daya beli masyarakat petani lebih baik dari tahun dasar, atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari tahun dasar.

Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila nilai NTP lebih kecil dari 100, dimana petani mengalami defisit sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami penurunan. Sedangkan jika nilai NTP sama dengan 100 berarti tidak ada perubahan daya beli masyarakat petani dibandingkan dengan tahun dasar.

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) di Sumatera Barat pada periode 2013-2017 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada lima tahun terakhir tersebut kondisi petani menunjukkan keadaan yang masih belum terlalu baik. Hal ini memberi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani masih belum seperti yang diharapkan.

Pada tahun 2013-2014 NTP tercatat diatas 100 persen namun di tahun 2015 NTP tercatat sebesar 97,74 dan kembali turun di tahun 2016 menjadi 97,67 dan terus turun di 2017 sebesar 96,97. dengan perubahan sebesar -0,72 persen. Kondisi ini merupakan hal yang belum menggembirakan karena belum terjadi peningkatan kesejahteraan petani.

3.3. Laju Inflasi di Pedesaan

Tingkat laju inflasi di pedesaan dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah pedesaan. Secara regional di tahun 2017 inflasi dipedesaan sebesar 3,33 persen. Terjadinya inflasi di daerah pedesaan merupakan kontribusi dari terjadinya inflasi pada tujuh kelompok pengeluaran; kelompok bahan makanan (2,42); kelompok Makanan Jadi, Miunuman, Rokok, dan Tembakau (3,56); kelompok Perumahan (8,56); kelompok Sandang (4,93); kelompok Kesehatan (2,52); kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga (2,58); dan kelompok Transportasi dan Komunikasi (1,88). Inflasi tertinggi disumbangkan oleh kelompok Perumahan.

Inflasi yang terjadi di pedesaan menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di pedesaan juga mengalami peningkatan hampir sama dengan di perkotaan.

4

EKSPOR DAN IMPOR

☞ EKSPOR

☞ IMPOR

☞ NERACA PERDAGANGAN

SUMATERA BARAT

Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Statistik ekspor-impor dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perdagangan luar negeri suatu negara atau wilayah sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian.

Selain itu, statistik ekspor-impor juga digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (*Balance of Payment/BOP*). Hal ini berarti bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ekspor-impor yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan luar negeri memberikan sumbangan yang berarti terhadap Produk Domestik Bruto dan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (Salvatore, 2007).

Sampai tahun 2017, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain kelapa sawit, karet remah dan komoditas hasil tambang seperti batu bara. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang sangat berlimpah tersebut, Indonesia

memiliki potensi untuk memegang peranan penting dalam perdagangan dunia.

Sudah empat tahun terakhir nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan. Nilai ekspor tahun 2013 sebesar US\$ 182,55 miliar turun menjadi US\$ 145,19 miliar pada tahun 2016 atau turun 20,47 persen dibandingkan tahun 2013. Faktor ekonomi global dan pelemahan harga komoditas ekspor masih dituding sebagai penyebab utamanya.

Memasuki akhir tahun 2017, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian global dan penguatan harga komoditas yang merupakan pendorong transaksi perdagangan dunia.

Tahun 2017 merupakan titik balik kinerja ekspor cukup besar. Nilai ekspor Indonesia tahun 2017 sebesar US\$ 168,73 miliar atau meningkat 16,22 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan total nilai ekspor seiring dengan peningkatan nilai ekspor migas dan non migas. Nilai ekspor migas tahun 2017 meningkat 20,09 persen dibandingkan tahun

2016, sementara nilai ekspor non migas meningkat 15,83 persen.

Kinerja impor Indonesia tahun 2017 tercatat mencapai US\$ 156,89 miliar atau naik 15,66 persen dibanding tahun 2016. Kenaikan impor bulan ini disebabkan oleh meningkatnya impor nonmigas sebesar 13,41 persen menjadi US\$ 132,58 miliar, dan impor migas yang naik sebesar 29,71 persen menjadi US\$ 24,31 miliar. Kenaikan nilai impor tersebut juga didorong oleh kenaikan impor seluruh jenis barang. Impor bahan baku/penolong naik sebesar 16,56 persen, dan impor barang modal naik sebesar 12,14 persen, serta barang konsumsi naik sebesar 14,69 persen.

Kinerja ekspor dan impor tahun 2017 ini, memberikan kontribusi terhadap kinerja perdagangan kumulatif selama tahun 2017 yang menghasilkan surplus US\$ 9,53 miliar. Surplus ini dihasilkan dari surplus perdagangan nonmigas yang mencapai US\$ 15,17 miliar dikurangi defisit perdagangan migas sebesar US\$ 5,63 miliar.

Negara-negara penyumbang surplus nonmigas terbesar pada tahun

2017 dengan jumlah mencapai US\$ 25,54 miliar yaitu India, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Italia, dan Belanda. Sedangkan mitra dagang yang menyebabkan defisit terbesar yang jumlahnya mencapai US\$ 23,71 miliar yaitu Tiongkok, Thailand, Jepang, Australia, Korea Selatan, Taiwan dan Jerman.

Realisasi ekspor nonmigas ke negara tujuan utama pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, diantaranya Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US\$ 21.321,6 juta (13,94 persen), naik sebesar 41,03 persen dibanding tahun 2016 dan diikuti Amerika Serikat dengan nilai US\$ 17.142,1 juta (11,20 persen), juga mengalami peningkatan sebesar 9,29 persen dibanding 2016. Negara tujuan ekspor ketiga terbesar adalah Jepang dengan nilai US\$ 14.695,0 juta (9,60 persen) naik sebesar 11,25 persen.

Perkembangan impor non-migas Indonesia tahun 2017 meningkat sejalan dengan meningkatnya impor non-migas dari tiga belas negara utama.

Meningkatnya kinerja ekspor Indonesia di tahun 2017 berdampak juga pada kinerja ekspor Sumatera Barat. Hal itu dipicu oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal antara lain makin pulihnya perekonomian global, terutama perekonomian negara tujuan ekspor migas dan nonmigas Indonesia serta membaiknya harga komoditas di pasar internasional sehingga permintaan barang dari Indonesia juga meningkat. Kondisi ekonomi global yang dialami negara-negara utama pengimpor barang dari Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan India sampai saat ini kondisi ekonominya juga meningkat sehingga berimbas pada daya beli masyarakatnya. Akibatnya, permintaan dari sektor industri yang menggunakan bahan baku dari Indonesia semakin meningkat.

Adapun faktor internal yang memicu meningkatnya kinerja ekspor Indonesia adalah adanya perbaikan daya saing produk ekspor, peningkatan produksi sejumlah komoditas dan perbaikan iklim usaha di dalam negeri.

Kondisi perdagangan internasional di tahun 2018 diperkirakan masih akan tetap meningkat karena menurut *International Monetary Fund* (IMF) atau Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi beberapa negara tujuan ekspor Indonesia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2017.

Kebijakan proteksionisme yang akan dijalankan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia. Bahkan, bisa jadi, peluang ekspor ke Amerika Serikat akan semakin besar. Pasalnya, Trump akan memperketat impor dari sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Meksiko. Untuk mengisi kekosongan barang yang dipasok dari negara-negara itu, Trump akan mendorong produksi dalam negeri dan selebihnya akan diimpor dari negara lain. Nah, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan ekspornya ke Amerika Serikat.

Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam mencari pasar alternatif untuk komoditas ekspor andalan negara ini dan mendorong produk lainnya sehingga dapat memunculkan komoditas andalan yang memiliki nilai jual untuk bersaing. Pasar ekspor ASEAN yang semakin terbuka akan mendorong pertumbuhan produksi nasional berorientasi ekspor, karena hambatan perdagangan cenderung berkurang sehingga dapat meningkatkan ekspor, memperoleh impor dengan biaya lebih murah, dan meningkatkan konektivitas antar negara.

Kondisi-kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan internasional. Namun, tanpa adanya perbaikan daya saing yang signifikan, peningkatan produksi yang berkualitas, perbaikan iklim usaha di dalam negeri, dan regulasi yang memadai, bisa jadi kinerja perdagangan internasional akan menurun lagi.

4.1. Ekspor

Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui

seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor ini, kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri, tapi juga berputar di perdagangan Internasional. Karena itu, dalam jangka panjang kegiatan ekspor dapat menjadi pahlawan devisa bagi pertumbuhan ekonomi negara. merupakan salah satu komponen pembentuk perekonomian nasional. Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan hasil bumi, bahkan penghasil komoditi unggulan di dunia. Baik dari sektor sumber daya alam maupun produk-produk yang dihasilkan anak bangsa. Maka, tak heran kalau Sumatera Barat menjadi salah satu pengekspor dengan daftar negara tujuan yang cukup panjang.

Peningkatan jenis, volume, dan nilai ekspor serta ekspor produk industri merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 bidang ekonomi dalam pengembangan perdagangan. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) tahun

2016-2021 dengan strategi pembangunan berupa pengembangan pasar ekspor. Dalam mewujudkan prioritas tersebut diambil arah kebijakan yang fokus prioritas kegiatan berupa:

1. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor.
2. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor.
3. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional.
4. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan tahun 2016, Ekonomi Sumatera Barat tahun 2017 tumbuh 5,29 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang naik, salah satunya dipicu oleh membaiknya kinerja ekspor. Secara total nilai ekspor Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar US\$ 2,05 milyar. Dibanding dengan tahun sebelumnya, besaran ekspor tersebut sangat menggembirakan karena pada tahun 2016 nilai ekspor lebih rendah, yaitu tercatat sebesar US\$ 1,71 milyar.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 19,77 persen.

Peningkatan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat tersebut sejalan dengan peningkatan volume ekspor. Tahun 2016 volume ekspor sebesar 3,64 juta ton, sementara itu pada tahun 2017 volume ekspor sudah mencapai 4,72 juta ton atau mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 29,66 persen. Meningkatnya kinerja ekspor Sumatera Barat selama tahun 2017 disebabkan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang dan peningkatan produksi kelapa sawit, karet, buah-buahan dan kayu manis sebagai bahan baku ekspor komoditas di Sumatera Barat.

Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Sumatera Barat masih didominasi oleh ekspor hasil industri. Pada tahun 2017, nilai ekspor dari hasil industri mencapai US\$ 1,99 milyar atau 97,16 persen dari total nilai ekspor Sumatera Barat. Nilai ekspor tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2016 nilai ekspor hasil industri sebesar

US\$ 1,66 milyar (97,17 persen dari total nilai ekspor).

Sampai saat ini ekspor hasil industri yang berasal dari pengolahan hasil pertanian masih menjadi komoditas ekspor utama Sumatera Barat. Ekspor utama dari kelompok tersebut adalah komoditi minyak kelapa sawit dengan kontribusi ekspor kelapa sawit terhadap total nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 67,56 persen. Pada tahun 2017 telah diekspor sebanyak 2,04 juta ton minyak kelapa sawit dengan nilai US\$ 1,38 milyar. Sementara itu pada tahun 2016 minyak kelapa sawit diekspor sebanyak 1,82 juta ton dengan nilai US\$ 1,16 milyar. Sehingga pada tahun 2017, volume ekspor minyak kelapa sawit naik sebesar 12,01 persen, sedangkan nilai ekspor naik sebesar 19,39 persen. Peningkatan penjualan ekspor minyak kelapa sawit seiring dengan peningkatan volume produksi sepanjang tahun 2017. Kenaikan harga komoditas minyak kelapa sawit di pasar internasional juga memicu peningkatan ekspor .

Selain minyak kelapa sawit, komoditi karet remah (*crumb rubber*) juga merupakan komoditi industri

pengolahan hasil pertanian yang nilai ekspornya menonjol. Kontribusi komoditi tersebut terhadap total nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2017 adalah 21,67 persen. Kontribusi nilai ekspor komoditi karet remah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, nilai ekspor karet remah tahun 2016 tercatat sebesar US\$ 358,86 juta naik menjadi US\$ 443,48 juta tahun 2017. Peningkatan ekspor pada hasil industri karet remah ditengarai akibat pulihnya perekonomian global khususnya Amerika Serikat, India, Singapura dan Tiongkok. Kondisi ini juga didukung oleh perbaikan harga komoditas karet di level internasional.

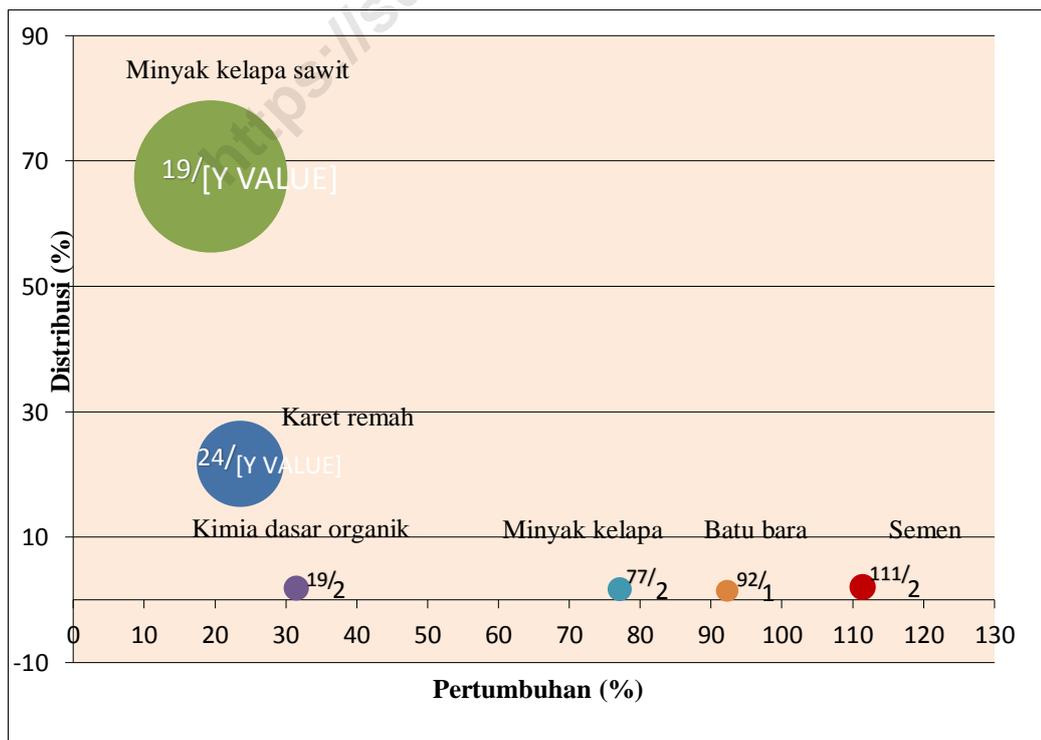
Nilai ekspor terbesar ketiga di Sumatera Barat adalah semen. Nilai ekspor semen tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari US\$ 19,52 juta tahun 2016 naik menjadi US\$ 41,26 juta tahun 2017 atau meningkat sebesar 111,39 persen. Peningkatan nilai ekspor ini sejalan juga dengan peningkatan volume ekspor semen. Volume ekspor semen tahun 2017 tercatat 483,45 ribu ton atau meningkat sebesar 127,09 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan

ekspor semen dipicu karena adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak terhadap pembangunan infrastruktur sehingga permintaan semen pun meningkat. Selain itu juga disebabkan karena PT. Semen Padang telah melakukan upaya memperluas jangkauan pasar manca negara seperti ekspor perdana ke Australia dan Myanmar.

Nilai ekspor komoditi kimia dasar organik yang bersumber dari

hasil pertanian dan minyak kelapa di Sumatera Barat juga mengalami peningkatan di tahun 2017 dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 tercatat nilai ekspor masing-masing komoditas tersebut sebesar US\$ 28,94 juta dan US\$ 19,22 juta, sedangkan di tahun 2017 masing-masing naik menjadi US\$ 38,06 juta dan US\$ 35,05 juta atau terjadi peningkatan masing-masing sebesar 31,48 persen dan 77,12 persen.

Gambar 4.1.1
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Utama Hasil Industri Pertanian dan Pertambangan di Sumatera Barat, Tahun 2017



Ket : X/Y
 X = Pertumbuhan
 Y = Distribusi

Tabel 4.1.1
Perkembangan Volume Dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Jenis Komoditi, 2016-2017

Jenis Komoditi	2016		2017	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Hasil Pertanian</u>	297 792.50	33 086.01	314 766.46	28 700.00
1. Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-rempah	5 281.13	9 554.62	1 654.91	3 902.08
2. Kopi	923.22	1 905.21	195.60	472.25
3. Ikan Hidup Hasil Tangkap	25.00	185.00	35.16	144.71
4. Ikan Segar / Dingin Hasil Tangkap	65.67	67.01	23.25	102.23
5. Getah Karet dan Sejenisnya	110.86	92.67	34.79	33.74
6. Cengkeh	13.50	111.71	3.00	23.15
7. Lada Putih	-	-	3.00	17.87
8. Kepiting	-	-	1.46	2.92
9. Ikan Segar / Dingin Hasil Budidaya	0.14	2.03	0.13	1.94
10. Ikan Hidup Hasil Budidaya	9.58	20.32	1.86	1.74
11. Hasil Pertanian Lainnya	291 363.41	21 147.43	312 813.30	23 997.38
<u>Hasil Industri</u>	2 928 476.86	1 659 919.81	3 697 292.04	1 988 202.35
1. Minyak Kelapa Sawit	1 821 857.51	1 157 913.63	2 040 575.17	1 382 392.40
2. Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	278 238.24	358 860.50	254 731.68	443 481.56
3. Semen	483 451.08	19 520.94	1 097 862.91	41 264.84
4. Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Pertanian	52 328.77	28 944.10	59 207.97	38 055.53
5. Minyak Kelapa	15 573.78	19 222.23	26 697.72	34 046.45
6. Bungkil dan Residu	252 446.78	23 422.95	209 846.96	20 640.58
7. Kayu Manis Bubuk	10 475.84	17 586.56	3 953.66	9 446.94
8. Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia	4 653.50	13 324.69	1 242.08	7 538.99
9. Minyak Atsiri	194.12	8 373.18	111.40	5 777.18
10. Makanan Olahan Lainnya	4 242.08	7 535.68	1 686.42	3 022.31
11. Hasil Industri Lainnya	5 015.17	5 215.34	1 376.09	2 535.56
<u>Hasil Pertambangan</u>	417 130.00	15 274.01	711 944.05	29 366.55

1. Batu Bara	417 130.00	15 274.01	711 944.05	29 366.55
Jumlah	3 643 399.36	1 708 279.83	4 724 002.55	2 046 268.89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 4.1.1 dapat dilihat bahwa nilai ekspor hasil pertanian secara keseluruhan mengalami penurunan. Hasil pertanian utama yang diekspor dari Sumatera Barat tahun 2017 adalah tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah yang mencapai 1,65 ribu ton dengan nilai US\$ 3,90 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, volume dan nilai ekspor tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni volume ekspor turun sebesar 68,66 persen dan nilai ekspor turun sebesar 59,16 persen.

Selain ekspor hasil pertanian dan hasil industri, Sumatera Barat juga mengekspor hasil pertambangan berupa batu bara, di tahun 2017 nilai ekspor batu bara menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan bila dibandingkan dengan ekspor tahun 2016. Pada tahun 2017 telah diekspor batu bara sebanyak 711,94 ribu ton

atau setara dengan nilai US\$ 29,37 juta. Sementara itu pada tahun 2016 ekspor batu bara sebanyak 417,13 ribu ton atau senilai US\$ 15,27 juta. Peningkatan ekspor batu bara ini terjadi karena meningkatnya permintaan dan mulai membaiknya harga batu bara di pasar Eropa dan Asia. Kenaikan harga ini terjadi sejak tahun 2016 sebagai imbas dari ditutupnya sebagian tambang di Tiongkok sehingga sehingga konsumen di dalam negerinya harus meningkatkan impornya.

Peningkatan ekspor di Sumatera Barat disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar utama ekspor seperti India, Amerika Serikat, Singapura dan Tiongkok. Keempat negara tersebut berturut-turut menguasai pangsa pasar sebesar 37,04; 22,50; 10,72 dan 4,75 persen atau secara bersama keempat negara tersebut menerima ekspor Sumatera Barat sebesar 75,20 persen terhadap total nilai ekspor Sumatera Barat di tahun 2017.

Posisi pertama dari negara tujuan ekspor Sumatera Barat sampai tahun 2017 masih ditempati oleh negara India. Pada tahun 2017 ekspor ke India tercatat sebesar US\$ 758,02 juta, angka ini naik dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar US\$ 653,50 juta. Selanjutnya tujuan ekspor Sumatera Barat yang menempati urutan kedua adalah negara Amerika Serikat. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai ekspor ke Amerika Serikat bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ekspor tercatat sebesar US\$ 342,11 juta sedangkan pada tahun 2017 meningkat sebesar 34,60 atau menjadi US\$ 460,48 juta.

Kelompok negara ASEAN merupakan pangsa pasar komoditi Sumatera Barat yang potensial. Selama tahun 2017, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN mencapai US\$ 337,54 juta, dibandingkan tahun sebelumnya nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 35,31 persen. Negara ASEAN utama yang merupakan tujuan ekspor Sumatera Barat sampai tahun 2017 adalah negara Singapura, dengan nilai ekspor mencapai US\$ 219,26 juta atau

meningkat sebesar 9,27 persen dibandingkan tahun 2016. Negara Singapura merupakan negara yang menempati urutan ketiga sebagai negara penerima ekspor Sumatera Barat.

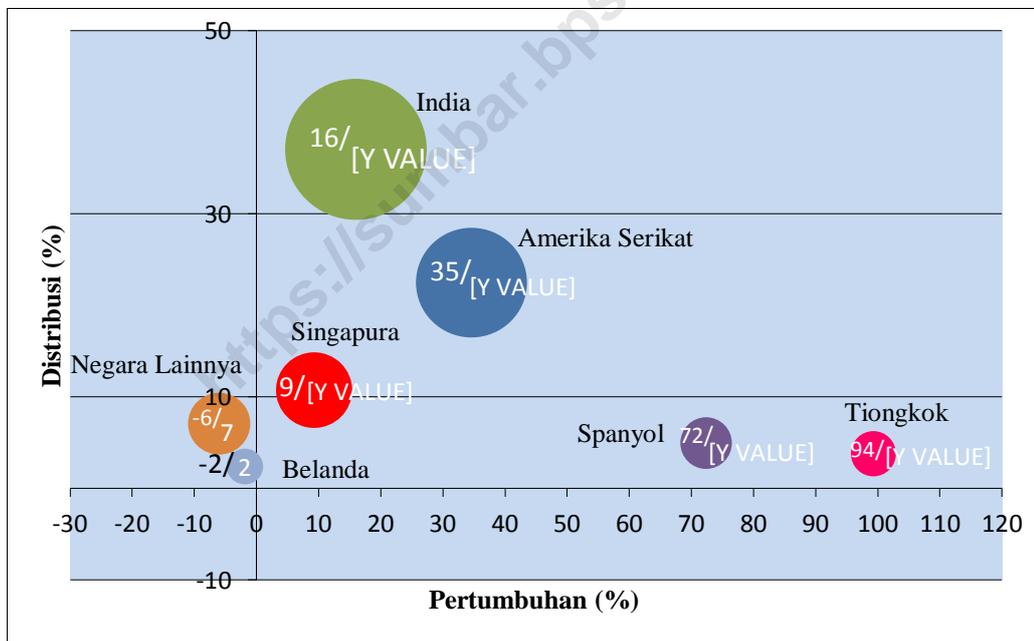
Selain Singapura, tujuan ekspor utama lainnya adalah negara Tiongkok, dengan nilai ekspor tahun 2017 mencapai US\$ 101,04 juta atau merupakan 4,94 persen dari total nilai ekspor Sumatera Barat. Nilai ekspor ke Tiongkok pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$ 58,61 juta.

Ekspor Sumatera Barat tahun 2017 ke negara Uni Eropa mencapai US\$ 142,75 juta, naik dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar US\$ 118,89 juta. Perkembangan ekspor ke negara Uni Eropa tidak sama antara satu negara dengan yang lainnya, ada yang meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan, namun secara umum kondisi pangsa pasar di tahun 2017 meningkat dibanding dengan keadaan tahun 2016 dengan pangsa pasar pada dua tahun tersebut masing-masingnya sebesar 6,98 persen dan 6,96 persen. Negara Uni Eropa yang

merupakan pangsa pasar utama Sumatera Barat adalah Spanyol dan Belanda. Pada tahun 2017 ekspor ke Spanyol mencapai US\$ 77,26 juta, naik dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar US\$ 38,77 juta. Sedangkan nilai ekspor ke Belanda pada tahun 2017 mengalami penurunan dari US\$

50,11 juta tahun 2016 menjadi US\$ 49,17 juta pada tahun 2017. Jika dilihat dari kontribusinya, nilai ekspor ke Spanyol dan Belanda masing-masing tercatat sebesar 3,78 persen dan 2,40 persen terhadap total nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2017.

Gambar 4.1.2
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Sumatera Barat
Menurut Negara Tujuan, Tahun 2017



Ket : X/Y
 X = Pertumbuhan
 Y = Distribusi

Tabel 4.1.2
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Negara Tujuan, 2016-2017

Negara Tujuan	2016		2017	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Apec ASEAN	420 416.78	249 465.36	523 327.20	337 544.39
- Singapura	333 071.60	200 658.47	321 989.15	219 265.92
- Malaysia	18 197.95	13 876.09	78 015.20	40 916.93
- Thailand	842.44	1 332.75	618.01	1 042.40
- Vietnam	6 727.97	798.24	13 500.87	6 722.49
- Myanmar	51 550.70	32 170.78	109 203.76	69 596.21
- Philipina	10 025.80	628.67	-	-
- Brunei Darussalam	0.33	0.35	0.22	0.43
Uni Eropa	206 767.21	118 885.21	197 393.81	142 746.43
- Belanda	76 184.62	50 108.34	68 331.52	49 167.33
- Italia	10 161.86	6 087.27	40.32	89.16
- Portugal	32.00	99.80	-	-
- Jerman	496.80	1 299.17	4 805.47	3 643.43
- Spanyol	63 173.43	38 769.33	114 656.38	77 264.51
- Perancis	596.72	1 421.45	341.80	846.89
- Swedia	525.00	284.37	-	-
- Yunani	1 618.39	1 106.99	4 958.36	4 378.44
- Belgia	1 590.32	3 103.65	393.31	721.39
- Denmark	1 244.17	928.97	-	-
- Latvia	3 467.52	4 412.98	3 278.68	5 558.70
- Polandia	47 344.78	10 770.56	104.14	173.81
- Estonia	30.00	121.30	-	-
- Kroasia	100.00	115.00	-	-
- Lithuania	201.60	256.03	483.84	902.76
Apec Nafta	289 309.94	354 484.94	334 370.74	466 982.90
- Kanada	8 392.44	10 649.36	2 766.44	5 515.65
- Amerika Serikat	279 632.30	342 113.25	331 075.10	460 476.02
- Mexico	1 285.20	1 722.33	529.20	991.24
Apec Afta Lainnya	549 997.76	115 105.74	699 734.42	153 565.37
- Australia	100.85	125.09	20 186.52	1 041.41
- Tiongkok	93 419.34	58 616.44	194 528.03	101 044.27
- Hongkong	4 381.70	3 331.68	119.21	158.77
- Jepang	173 443.00	18 418.76	285 170.24	30 041.91
- Korea, Republic of	135 357.89	18 222.73	34 477.12	4 107.42
- Taiwan, Province of Tiongkok	2 365.39	2 963.92	374.29	699.19
- Selandia Baru	140 929.60	13 427.12	164 879.00	16 472.40
Lainnya	2 176 907.67	870 338.57	2 969 176.38	945 429.80
- India	1 403 614.19	653 499.43	1 668 591.03	758 015.25
- Pakistan	33 935.68	18 977.23	23 100.62	16 094.32

- Inggris	66 320.43	43 475.59	33 890.92	26 198.50
- Negara Lainnya	673 037.38	154 386.32	1 243 593.82	145 121.73
Jumlah	3 643 399.36	1 708 279.83	4 724 002.55	2 046 268.89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.2. Impor

Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri, diantaranya pemerintah tetap harus menekan impor barang-barang yang akan masuk ke dalam negeri dan menghindari barang-barang impor yang bersifat konsumtif. Selain itu pemerintah juga dapat memberdayakan dan mendorong industri substitusi impor.

Impor barang di Sumatera Barat dilakukan melalui dua tempat, yaitu melalui pelabuhan laut dan udara. Barang yang diimpor melalui pelabuhan laut datang dari pelabuhan Muara dan pelabuhan Teluk Bayur. Barang impor dari pelabuhan udara saat ini masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Selama periode tahun 2008-2017 impor barang ke Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Namun sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 terlihat bahwa impor yang dilakukan makin meningkat, dan keadaan pada tahun 2012 merupakan yang terbesar dalam periode tersebut, yaitu sebanyak 1.580.604 ton. Pada tahun 2017 impor barang di Sumatera Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, tercatat volume impor sebanyak 1.015.617 ton tahun 2016 menjadi 1.024.623 ton tahun 2017 atau terjadi peningkatan volume impor sebesar 0,89 persen.

Seiring dengan berfluktuasinya volume impor barang di Sumatera Barat, pada nilai impor juga ditemui kondisi yang berfluktuasi untuk periode 2008–2017. Pada tahun 2008 nilai impor Sumatera Barat tercatat hanya sebesar US\$ 476,46 juta. Namun di tahun 2009 nilai impor Sumatera Barat mengalami penurunan, menjadi US\$ 346,25 juta. Seiring dengan peningkatan volume impor

yang mencapai jumlah tertinggi di tahun 2012, nilai impor juga meningkat menjadi US\$ 1,24 milyar. Namun selama periode 2013-2016 nilai impor Sumatera Barat cenderung turun, yaitu dari US\$ 1,04 milyar di tahun 2013 turun menjadi US\$ 0,35 milyar tahun 2016. Pada tahun 2017 nilai impor Sumatera Barat kembali meningkat menjadi US\$ 0,45 milyar atau naik 29,26 persen dibanding tahun 2016.

Sebagian besar barang impor ke Provinsi Sumatera Barat masuk

melalui pelabuhan Teluk Bayur, yang merupakan pelabuhan laut yang utama. Kondisi ini tidak mengalami perubahan selama satu dasawarsa ini. Sama halnya dengan total impor, impor barang dari pelabuhan Teluk Bayur mulai tahun 2008 menunjukkan tren peningkatan. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan impor, namun di tahun selanjutnya sampai tahun 2012 pemasukan barang impor melalui pelabuhan Teluk Bayur selalu meningkat.

Tabel 4.2.1
Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2008-2017

Tahun	Volume (ton)				Nilai (000 US\$)			
	Teluk Bayur	BIM	Muaro/ Padang (PTT)	Jumlah	Teluk Bayur	BIM	Muaro/ Padang (PTT)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2008	856 830	3	0	856 833	476 310	146	1	476 457
2009	656 688	0	-	656 688	346 198	49	-	346 247
2010	1 123 634	1	-	1 123 635	751 285	93	-	751 378
2011	1 300 779	3	-	1 300 782	1 075 141	1 597	-	1 076 738
2012	1 580 358	6	240	1 580 604	1 223 858	2 101	16 968	1 242 927
2013	1 330 877	1	-	1 330 878	1 034 896	109	-	1 035 005
2014	1 444 387	1	-	1 444 388	1 034 515	91	-	1 034 606
2015	1 483 259	0	-	1 483 259	632 744	53	-	632 798
2016	1 015 616	1	-	1 015 617	345 218	28	-	345 246
2017	1 023 730	893	-	1 024 623	443 069	3 194	-	446 264

Sumber : BPS, Jakarta

Selanjutnya pada periode 2013-2016 nilai diimpor melalui pelabuhan Teluk Bayur menunjukkan tren penurunan. Begitu juga dengan impor barang

melalui pelabuhan udara BIM. Pada tahun 2016, tercatat barang diimpor melalui pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan udara BIM, masing-masing

sebesar US\$ 345,22 juta dan US\$ 28 ribu. Selanjutnya pada tahun 2017, nilai diimpor melalui pelabuhan Teluk Bayur mengalami peningkatan yang signifikan, yakni US\$ 443,07 juta terbesar adalah golongan barang bahan bakar, bahan penyemir, dsb. Pada tahun 2014 terjadi penurunan volume impor untuk golongan barang tersebut, namun pada 2015 terjadi sedikit peningkatan volume impor. Pada tahun 2013 volume barang yang diimpor ke Sumatera Barat tercatat sebanyak 930,60 ribu ton. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi penurunan dalam volume impor bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 891,72 ribu ton. Namun tahun 2015, volume impor golongan barang tersebut terjadi peningkatan sebesar 1,45 persen atau menjadi 904,61 ribu ton dan tahun 2016 kembali terjadi penurunan sebesar 33,41 persen atau menjadi 602,38 ribu ton.

Pada tahun 2017, volume impor golongan barang bahan bakar, bahan penyemir, dsb mengalami peningkatan sebesar 10,17 persen atau menjadi 663,63 ribu ton. Meningkatnya permintaan impor pada tahun 2017 disebabkan oleh faktor

melalui pelabuhan Teluk Bayur dan US\$ 3,19 juta melalui BIM.

Sejak tahun 2013, jenis golongan barang yang diimpor ke Sumatera Barat dengan volume internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena meningkatnya pemenuhan bahan baku untuk industri dan barang modal untuk proyek infrastruktur. Sementara faktor eksternal adalah akibat adanya dampak pengalihan pasar ekspor.

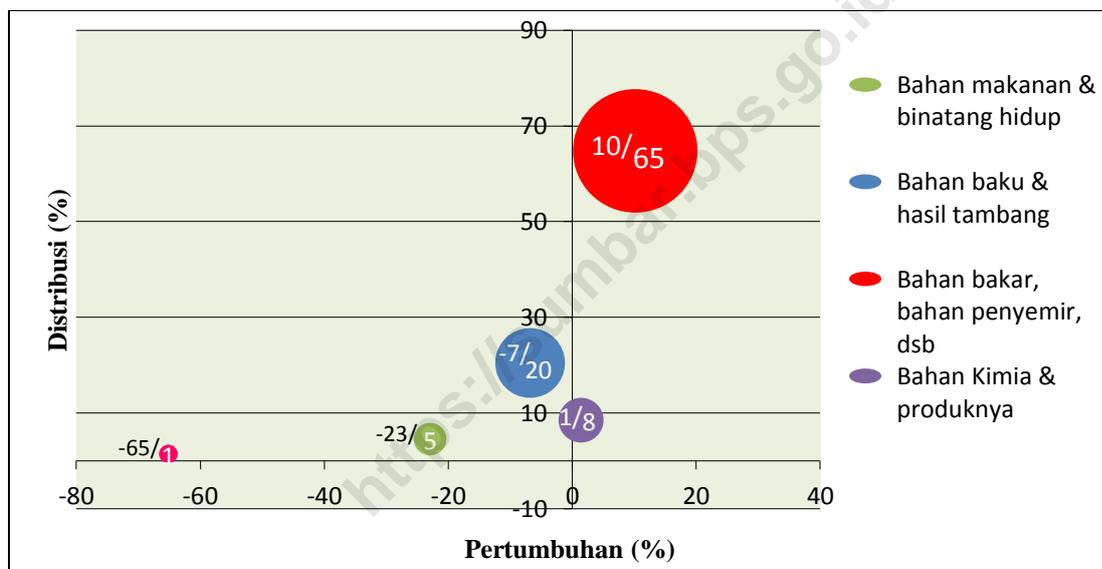
Selain golongan barang bahan bakar, bahan penyemir dsb, golongan yang termasuk bahan baku dan hasil tambang menempati urutan kedua dengan impor tahun 2017 sebesar 209,48 ribu ton, diikuti oleh golongan bahan kimia dan produknya yang diimpor sebanyak 86,68 ribu ton.

Sejalan dengan besarnya volume golongan barang bahan bakar, bahan penyemir, dsb yang diimpor ke Sumatera Barat selama tahun 2013-2017, nilai impor terbesar juga ditemui pada golongan tersebut. Pada tahun 2017 tercatat senilai US\$ 369,61 juta golongan barang bahan baku, bahan penyemir, dsb yang diimpor dengan kontribusi sebesar 82,82 persen. Nilai impor golongan barang tersebut di

tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 35,02 persen. Kontribusi nilai impor yang kedua dan ketiga terbesar adalah golongan bahan kimia &

produknya dan golongan bahan makanan & binatang hidup, masing-masing sebesar 4,60 persen dan 3,99 persen.

Gambar 4.2.1
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC, Tahun 2017



Ket : X/Y
 X = Pertumbuhan
 Y = Distribusi

Tabel 4.2.2
Volume Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC, Tahun 2013-2017 (ton)

Kode STIC	Golongan Barang	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
0	Bhn Makanan & Binatang Hidup	61 438	108 658	89 691	59 896	46 164
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	227 593	162 771	213 917	224 737	209 478
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	930 602	891 721	904 614	602 376	663 628
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	34 095	93 681	101 580	85 484	86 679
6	Hasil industri pabrik	75 494	185 102	172 363	42 265	14 721

7	Mesin dan alat angkutan	1 577	2 442	1 077	850	3 062
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	79	13	-	9	891
Jumlah		1 330 878	1 444 388	1 483 259	1 015 617	1 024 623

Sumber: BPS, Jakarta

Tabel 4.2.3
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang I Digit STIC,
Tahun 2013-2017
(000 US\$)

Kode STIC	Golongan Barang	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	23 477	41 700	31 921	23 964	17 799
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	9 857	7 571	6 683	5 844	6 624
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	950 342	920 267	541 943	273 747	369 611
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	13 432	27 213	29 844	22 232	20 515
6	Hasil industri pabrik	23 948	27 885	17 244	12 880	13 930
7	Mesin dan alat angkutan	13 500	9 957	5 163	6 566	15 284
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	449	14	-	13	2 501
Jumlah		1 035 005	1 034 606	632 798	345 246	446 264

Sumber: BPS, Jakarta

4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat

Neraca perdagangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan nilai yang diterima oleh suatu negara di dalam perdagangan. Peningkatan yang ada pada neraca perdagangan, apalagi jika mengalami surplus, akan berdampak pada

peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Mengingat begitu strategisnya peranan perdagangan luar negeri dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan melakukan kebijakan-

kebijakan yang menggairahkan dunia usaha. Diharapkan dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan akan menaikkan cadangan devisa negara dan dapat lebih memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor selalu lebih besar daripada kinerja impor. Walaupun neraca perdagangan selalu mengalami surplus, namun nilainya berfluktuasi. Pada tahun 2013 neraca perdagangan Sumatera Barat tercatat sebesar US\$ 1,17 milyar dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi US\$ 1,07 milyar. Pada tahun 2015, neraca perdagangan Sumatera Barat naik, menjadi US\$ 1,12 milyar. Kemudian di tahun 2016 neraca perdagangan Sumatera Barat naik lagi menjadi US\$ 1,36 milyar. Surplus neraca perdagangan Sumatera Barat tahun 2015 dan 2016 merupakan hasil dari impor yang semakin melemah dan ekspor yang tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, neraca

perdagangan Sumatera Barat kembali mengalami surplus menjadi US\$ 1,60 milyar. Surplus perdagangan ini terjadi karena jumlah ekspor kembali meningkat dan impor berhasil ditekan. Kondisi ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dan kebijakan impor berupa:

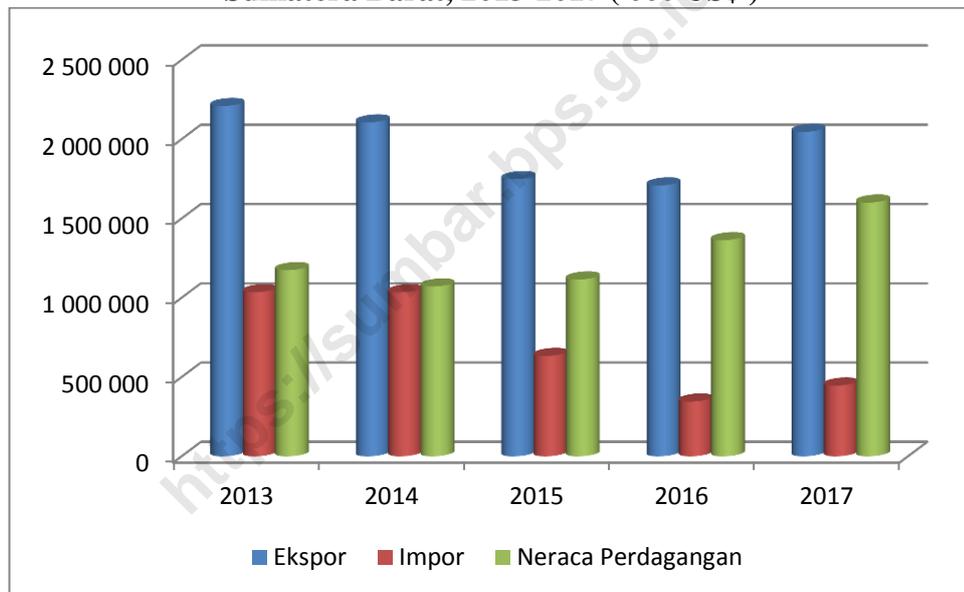
1. Diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor.
2. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri.
3. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing.
4. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan gerakan cinta produk dalam negeri serta peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan produksi hasil kerajinan rumah tangga dan lain-lain.
5. Membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri.

Tabel 4.3.1
Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2013-2017 (000 US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	2 209 012	1 035 005	1 174 007
2014	2 105 614	1 034 606	1 071 008
2015	1 748 008	632 798	1 115 210
2016	1 708 280	345 246	1 363 034
2017	2 046 269	446 264	1 600 005

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.3.1
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2013-2017 (000 US\$)



5

KEUANGAN DAERAH

☞ **KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT**

☞ **KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Secara menyeluruh tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan mengikuti program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah menyusun suatu anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mempunyai tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dalam APBD tersebut tercakup perencanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ini sangat besar, yang bersumber dari potensi daerah tersebut dan sumber lain. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, kemampuan daerah sangat diperlukan untuk menggali seoptimal mungkin sumber daya yang ada.

5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat di tahun 2017 menunjukkan kondisi yang makin baik. Di tahun tersebut pendapatan meningkat dibanding tahun sebelumnya, demikian pula halnya dengan belanja yang juga bertambah besar. Seperti halnya pada tahun 2016, di tahun 2017 realisasi pendapatan daerah lebih besar dibanding dengan belanja daerah.

Pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah mencapai 6,07 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 5,76 triliun rupiah.

Sementara itu, pada tahun 2016 realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 4,62 triliun rupiah dan belanja sebesar 4,50 triliun rupiah.

5.1.1 Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penerimaan atau pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga sumber. Ketiga sumber ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sama dengan kondisi di tahun sebelumnya, sumber pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terbesar pada tahun 2017 berasal dari Dana Perimbangan. Pada urutan kedua ditempati oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada di urutan ketiga. Pada tahun tersebut dari ketiga jenis sumber pendapatan ini dua diantaranya mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, kecuali Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi atas empat (4) bagian, yaitu

yang berasal dari (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun 2017. Provinsi Sumatera Barat telah berhasil merealisasikan pendapatan dari PAD sebanyak 2,13 triliun rupiah. Realisasi PAD ini meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 1,96 triliun rupiah.

Realisasi PAD ini sebagian besar berasal dari pajak daerah yang pada tahun 2017 memberikan andil sebesar 76,24 persen dari total PAD. Dari keempat sumber PAD, kesemuanya mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,63 triliun rupiah dari sebelumnya yang hanya sebesar 1,52 triliun rupiah di tahun 2016. Selanjutnya realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat sebesar 89,99 milyar rupiah di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 94,61 milyar rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 5,14 persen. Pada penerimaan yang termasuk pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ber-

tambah dari 332,68 milyar rupiah di tahun 2016 menjadi 389,57 milyar rupiah di tahun 2017. Dari hasil retribusi daerah di tahun 2016 didapatkan PAD sebesar 19,36 milyar rupiah yang kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 22,91 milyar rupiah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi dari dana perimbangan yang diterima Provinsi Sumatera Barat di tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 tercatat dana perimbangan sebesar 2,58 triliun rupiah, dan di tahun 2017 dana perimbangan Sumatera Barat menjadi 3,87 triliun rupiah. Sebagian besar dari dana perimbangan adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tahun 2017 terealisasi sebesar 2,02 triliun rupiah lebih dari separuhnya (53,10%) merupakan dari dana perimbangan. Berikutnya adalah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terealisasi sebesar 1,70 triliun rupiah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan

pajak dengan realisasi sebesar 152,44 milyar rupiah di tahun yang sama. Secara keseluruhan, dana perimbangan ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya pada tiap bagian. Kenaikan tajam terjadi pada kelompok dana perimbangan yang berasal dari dana alokasi khusus dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tercatat dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan DAU masing-masingnya berjumlah 134,50 milyar rupiah dan 1,26 triliun rupiah, sedangkan DAK tercatat sebesar 1,18 triliun rupiah.

Pendapatan daerah yang termasuk pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di tahun 2017 juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Pada tahun 2016 penerimaan daerah dari kelompok ini adalah sebesar 83,77 milyar rupiah, sementara itu di tahun 2017 menurun menjadi 66,15 milyar rupiah. Pendapatan daerah tersebut pada tahun 2016 terealisasi atas empat macam; pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan, dan pendapatan lainnya. Sedangkan pada tahun 2017 hanya terealisasi atas dua macam; hibah,

dana penyesuaian dan otonomi khusus. Realisasi dari kedua macam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 berturut-turut adalah 15,80 milyar rupiah dan 50,35 milyar rupiah. Secara keseluruhan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 mengalami kontraksi hingga 21,03 persen. Sedangkan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, bantuan keuangan, dan pendapatan lainnya tidak ditetapkan target dan realisasinya pada APBD Sumatera Barat.

5.1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk operasional guna penyelenggaraan roda pemerintahan. Selanjutnya hal ini akan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Laporan realisasi APBD tahun 2017 menyatakan bahwa belanja daerah pemerintah Sumatera Barat adalah sebesar 5,76 triliun rupiah. Realisasi belanja ini mengalami pe-

ningkatan dibanding tahun 2016 yang terealisasi sebanyak 4,50 triliun rupiah atau pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 27,88 persen.

Belanja daerah dalam APBD dikelompokkan atas dua kelompok; yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum, misalnya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon, ada atau tidak ada program/kegiatan tetap harus dibayar. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

pengeluaran untuk belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung.

Sama halnya dengan keadaan tahun sebelumnya, pada tahun 2017

**Tabel 5.1.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2017 (Rupiah)**

Uraian (1)	Tahun	
	2016 (2)	2017 (3)
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>		
Pendapatan Asli Daerah	1 964 148 975 799	2 134 010 519 503
Pajak Daerah	1 522 119 229 711	1 626 923 373 074
Retribusi daerah	19 362 263 096	22 906 556 272
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	89 986 731 933	94 610 436 713
Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah	332 680 751 059	389 570 153 444
Dana Perimbangan	2 576 754 985 110	3 866 663 233 168
Dana Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak	134 500 315 110	152 435 926 311
Dana Alokasi Umum	1 261 915 864 000	2 014 646 639 000
Dana Alokasi Khusus	1 180 338 806 000	1 699 580 667 857
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	83 770 585 031	66 153 101 285
Hibah	5 534 829 807	15 804 149 285
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dr Provinsi & Pemda lainnya	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41 853 286 000	50 348 952 000
Bantuan keuangan	12 499 950 000	-
Pendapatan lainnya	23 882 519 224	-
Jumlah Pendapatan	4 624 674 545 940	6 066 826 853 956
<u>BELANJA DAERAH</u>		
Belanja Tidak Langsung	2 600 444 061 217	3 665 975 570 679
Belanja Langsung	1 903 593 197 543	2 093 842 821 722
Jumlah Belanja Daerah	4 504 037 258 760	5 759 818 392 401
<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>		
Penerimaan Pembiayaan	251 496 991 474	297 134 278 653
Pengeluaran Pembiayaan	75 000 000 000	73 000 000 000
<u>Pembiayaan Netto</u>	165 757 217 426	224 134 278 653

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun tersebut realisasi belanja tidak langsung adalah 3,67 triliun rupiah, sedangkan belanja langsung sebesar 2,09 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2016 realisasi belanja tidak langsung tercatat sebesar 2,60 triliun rupiah, dan belanja langsung dengan nilai 1,90 triliun rupiah.

5 2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara total APBD dari pos penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah 19,62 triliun rupiah. Sumber penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar 15,74 triliun rupiah atau mencapai 78,01 persen dari total APBD. Sementara itu penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masingnya berjumlah 1,92 triliun rupiah dan 1,96 triliun rupiah.

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Sumatera Barat, Kota Padang mempunyai penerimaan

APBD yang terbesar. Di tahun 2017 pendapatan APBD kota Padang diperkirakan mencapai 2,16 triliun rupiah. Sebagaimana halnya dengan total penerimaan pada kabupaten/kota se-Sumatera Barat, sumber penerimaan terbesar Kota Padang juga berasal dari dana perimbangan yang tercatat sebanyak 1,51 triliun rupiah. Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu masing-masing sebesar 490,93 milyar rupiah dan 160,97 milyar rupiah.

Dibanding dengan Kota Padang, daerah perkotaan yang lainnya di Sumatera Barat mempunyai penerimaan APBD yang jauh lebih kecil, bahkan tidak mencapai separuhnya. Namun keenam daerah kota tersebut memiliki *range* APBD yang tidak terlalu jauh antara satu dengan lainnya. Setelah Kota Padang, Payakumbuh menempati urutan kedua dalam hal jumlah penerimaan pendapatan. Pada tahun 2017 APBD Payakumbuh adalah sebesar 746,93 milyar rupiah, sedangkan yang paling kecil adalah APBD Kota Padang Panjang sebesar 591,11 milyar rupiah.

Tabel 5 2 1
Ringkasan APBD Kabupaten/Kota Menurut Sumber Penerimaan Tahun 2017
(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain pendapatan yang sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Kabupaten				
1 Kep Mentawai	52 842 958,05	753 360 204,00	115 491 602,00	921 694 764,05
2 Pesisir Selatan	116 095 536,07	1 142 864 174,00	210 927 145,75	1 469 886 855,82
3 Solok	60 777 909,35	944 516 025,00	114 249 414,71	1 119 543 349,06
4 Sijunjung	105 442 901,62	738 585 105,00	154 964 861,00	998 992 867,62
5 Tanah Datar	128 397 031,00	985 642 878,00	111 758 163,00	1 226 798 072,00
6 Padang Pariaman	85 832 308,38	1 133 521 617,45	193 638 665,00	1 412 992 590,83
7 Agam	101 034 248,00	1 159 469 737,00	131 198 413,00	1 391 702 398,00
8 Lima Puluh Kota	75 231 567,00	1 033 008 739,00	156 534 949,00	1 264 775 255,00
9 Pasaman	77 721 032,68	820 610 781,00	79 045 428,14	977 377 241,82
10 Solok Selatan	46 789 014,38	655 534 573,00	76 782 356,00	779 105 943,38
11 Dharmasraya	79 913 861,33	721 706 807,75	155 288 405,00	956 909 074,08
12 Pasaman Barat	83 182 030,97	903 366 630,67	66 344 570,49	1 052 893 232,13
B Kota				
71 Padang	490 930 888,78	1 507 050 423,00	160 972 808,00	2 158 954 119,78
72 Solok	43 875 034,37	543 914 498,00	10 898 429,88	598 687 962,25
73 Sawahlunto	62 748 203,10	490 044 517,36	52 243 694,00	605 036 414,46
74 Padang Panjang	67 327 988,00	465 460 145,00	58 320 656,00	591 108 789,00
75 Bukittinggi	97 524 097,15	577 015 505,00	28 597 531,00	703 137 133,15
76 Payakumbuh	114 778 257,96	609 533 394,84	22 617 141,00	746 928 793,80
77 Pariaman	32 035 079,87	549 829 481,90	63 786 254,10	645 650 815,87
Jumlah	1 922 47999 948,07	15 736 035 236,97	1 963 660 487,06	19 622 175 672,10

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera PS Provinsi Sumatera Barat

Semua APBD daerah kabupaten lebih tinggi dibanding daerah kota (selain Kota Padang). APBD paling besar di daerah kabupaten dari sisi penerimaan adalah APBD Kabupaten

Pesisir Selatan, dengan nilai sebesar 1,47 triliun rupiah. Selanjutnya yang paling rendah adalah APBD di Kabupaten Solok Selatan dengan nilai 779,10 miliar rupiah. Untuk semua

daerah kabupaten/kota, pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana perimbangan.

Daerah yang memiliki PAD terbesar di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang adalah Kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan dengan nilai PAD-nya masing-masing sebesar 128,38 miliar rupiah dan 116,09 milyar rupiah. Sedangkan daerah yang memiliki PAD paling rendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 32,04 miliar rupiah.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat pada tahun 2017 sedikit lebih tinggi dibanding pendapatan pemerintah daerah. Di tahun tersebut pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota berjumlah 19,24 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 19,23 triliun rupiah.

Realisasi APBD Kota Padang tahun 2017 merupakan yang paling besar bila dilihat baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah dibanding daerah kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Kota Padang sedikit lebih kecil daripada pendapatan daerah

yaitu sekitar 2,08 triliun rupiah dibanding 2,09 triliun rupiah.

Selain Kota Padang, secara umum pendapatan dan belanja daerah kabupaten jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah kota. Kabupaten-kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah yang termasuk tinggi antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Tanah datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat. Ketujuh kabupaten tersebut memiliki realisasi pendapatan di atas 1 triliun rupiah. Demikian juga dengan belanja daerah ketujuh kabupaten tersebut juga berada pada kisaran satu triliun rupiah. Sementara itu, kabupaten yang memiliki realisasi belanja daerah yang paling rendah adalah Kabupaten Solok Selatan sebesar 801,94 miliar rupiah.

Realisasi pendapatan daerah kota selain Padang berada pada kisaran yang hampir sama. Realisasi paling besar dicatat di Kota Payakumbuh dengan nilai sebesar 718,76 milyar rupiah dan yang paling rendah terdapat di Kota Solok sebesar 584,11 miliar rupiah.

Realisasi belanja daerah kota selain kota Padang juga tidak memiliki

rentang yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja daerah terbesar terdapat pada kota Payakumbuh dengan nilai sebesar 677,35 milyar rupiah, sedangkan terendah terdapat pada Kota Solok sebesar 548,03 miliar rupiah.

Tabel 5 2 2
Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 - 2017 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016		2017*)	
	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Kabupaten				
1 Kep Mentawai	910 036 777,55	990 803 893,24	778 220 949,97	986 844 044,10
2 Pesisir Selatan	1 457 940 857,33	1 500 649 148,34	1 512 055 881,19	1 466 947 640,58
3 Solok	1 128 678 628,07	1 185 171 232,10	1 137 661 561,23	1 172 486 403,66
4 Sijunjung	884 731 195,67	932 031 385,89	975 949 235,49	896 037 697,70
5 Tanah Datar	1 188 763 795,26	1 106 141 805,49	1 224 536 045,42	1 218 767 078,21
6 Pdg Pariaman	1 353 306 741,30	1 336 323 358,55	1 386 828 227,53	1 413 558 520,00
7 Agam	1 349 740 830,33	1 354 855 315,10	1 378 924 120,70	1 398 413 430,21
8 Limapuluh Kota	1 178 893 526,25	1 244 704 809,74	1 223 677 235,01	1 182 475 517,17
9 Pasaman	971 661 069,85	1 061 344 063,60	959 242 315,66	954 322 788,59
10 Solok Selatan	776 513 084,98	814 299 953,92	799 620 494,35	801 940 822,98
11 Dharmasraya	875 675 582,52	881 881 597,92	949 013 729,22	935 464 103,16
12 Pasaman Barat	1 069 252 362,65	1 060 377 597,62	1 056 158 232,59	1 082 148 777,23
B Kota				
71 Padang	1 969 422 052,72	2 173 503 996,31	2 092 319 102,33	2 077 523 468,19
72 Solok	573 544 451,67	548 992 336,47	584 112 887,06	548 029 201,67
73 Sawahlunto	601 416 292,74	602 138 436,50	584 828 455,12	586 462 126,16
74 Padang Panjang	548 688 359,82	548 861 092,70	591 062 889,67	608 108 212,41
75 Bukittinggi	647 045 721,85	630 661 294,71	652 963 986,94	590 364 874,92
76 Payakumbuh	717 632 636,49	741 093 594,89	718 759 563,72	677 353 854,08
77 Pariaman	621 535 178,05	664 690 733,67	639 025 360,10	639 343 653,91
Jumlah	18 825 727 145,21	19 378 525 646,76	19 244 960 273,41	19 236 592 215,01
Prov Sumbar	4 624 674 545,94	4 504 037 258,76	6 066 826 853,96	5 759 818 392,40
Seluruhnya	23 685 799 223,19	23 882 562 905,52	25 311 787 127,37	24 994 410 607,41

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera PS Provinsi Sumatera Barat

*) Angka Sementara



PERBANKAN

-  **STRUKTUR PERBANKAN**
-  **PENGHIMPUNAN DANA BANK**
-  **POSISI KREDIT PERBANKAN**

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis industri perbankan pada tahun 2017 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya menyusul pertumbuhan ekonomi nasional serta perbaikan global. Hal ini juga didorong keberhasilan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan pemulihan harga komoditas. OJK memperkirakan kredit bank akan tumbuh sebesar 13,25 persen.

Tantangan utama untuk sektor perbankan di tahun 2017 dan kedepannya meliputi faktor risiko likuiditas. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat, *The Federal Reserve*

(*The Fed*), yang berniat menaikkan suku bunga acuan hingga tiga kali pada 2017. Hal ini berpotensi menjadi masalah karena efek *Fed Fund rate* mampu memicu terjadinya *capital outflow* yang berakhir pada perginya dana asing. Faktor berikutnya adalah risiko kredit. Sebuah riset dari *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) dalam *Indonesia Banking Survey 2017* menyebutkan bahwa risiko kredit dianggap sebagai tantangan utama bagi dunia perbankan pada 2017.

Secara umum, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pengembangan pasar keuangan Indonesia di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura hingga kini masih lambat. Kapitalisasi pasar keuangan Indonesia hanya 41% dari PDB.

Kondisi perbankan di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan jumlah penyaluran kredit, diikuti oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL). Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat mencatat kredit bermasalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi ini hingga Juni 2016 mencapai 7,48

persen. Pada Juni 2017 mengalami penurunan menjadi 6,87 persen. Hal ini merupakan berita yang baik, namun ini masih lampu kuning bagi perbankan karena seharusnya di bawah lima persen.

6.1. Struktur Perbankan

Berdasarkan kegiatan usaha, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang masing-masing dirinci lagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Alquran, As Sunnah, dan lain-lain). Secara operasional bank syariah dijabarkan sebagai bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan bunga. Kondisi ini tentu membuka peluang untuk berkembangnya bank syariah di Sumatera Barat yang merupakan daerah yang didominasi penduduk beragama Islam.

Yang dimaksud dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. BPR merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

Menurut jenisnya bank umum konvensional dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja.

Dari segi kepemilikannya, bank umum terdiri dari bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional dan bank asing/campuran.

Jumlah bank pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah bank pada 2017 berjumlah sebanyak yaitu berjumlah 104 bank.

Jumlah kantor bank juga mengalami penurunan dibanding

tahun 2015 dan 2016. Jumlah kantor bank pada tahun 2017 berjumlah 596 kantor bank. Kantor bank disini mencakup kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Secara total jumlah bank dan kantor bank di Sumatera Barat pada tahun 2017 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015. Pada tahun 2017 ini, jumlah bank konvensional terjadi pengurangan satu bank. Perubahan jumlah ini terjadi pada Bank

Perkreditan Rakyat. Jumlah bank syariah juga mengalami penurunan menjadi 13 bank dari tahun sebelumnya yang berjumlah 14 bank. Penurunan ini terdapat pada bank umum sebanyak 1 bank.

Selanjutnya pada tahun 2017 juga mengalami penurunan jumlah kantor bank. Jumlah kantor bank di Sumatera Barat terjadi pada jenis bank konvensional, namun pada bank syariah mengalami peningkatan.

Tabel 6.1.1
Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2015-2017

Jenis Bank	2015		2016		2017	
	Bank	Kantor Bank	Bank	Kantor Bank	Bank	Kantor Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Bank Konvensional	94	513	92	510	91	485
1. Bank Umum	1	278	1	278	1	259
1.1. Bank Umum Devisa	1	243	1	243	1	237
1. Bank Pemerintah	0	85	0	85	0	91
2. BPD	1	94	1	94	1	67
3. Bank Swasta Nasional	0	64	0	64	0	79
4. Bank Asing & Campuran	0	0	0	0	0	0
1.2. Bank Umum Non Devisa	0	35	0	35	0	22
1. Bank Pemerintah	0	0	0	0	0	0
2. BPD	0	0	0	0	0	0
3. Bank Swasta Nasional	0	34	0	34	0	22
4. Bank Asing & Campuran	0	1	0	1	0	0
2. Bank Perkreditan Rakyat	93	235	91	232	90	226
BPR	93	235	91	232	90	226
II. Bank Syariah	14	99	14	97	13	111
1. Bank Umum	7	56	7	55	6	73
2. Bank Umum Unit Usaha Syariah	0	11	0	10	0	9
3. Bank Perkreditan Rakyat	7	32	7	32	7	29
Jumlah	108	612	106	607	104	596

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Penurunan jumlah kantor bank pada bank konvensional berkurang sebanyak 25 bank, sedangkan pada bank syariah mengalami penambahan sebanyak 14 bank. Bila dirinci lebih lanjut, pengurangan jumlah kantor bank pada bank konvensional disebabkan penurunan jumlah kantor bank pada bank umum sebanyak

19 bank dan bank perkreditan rakyat sebanyak 6 bank. Penambahan pada bank syariah disebabkan karena adanya penambahan bank umum sebanyak 18 bank, namun terjadi penurunan pada bank umum unit usah syariah sebanyak satu bank dan bank perkreditan rakyat sebanyak tiga bank.

Tabel 6.2.1
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR di Sumatera Barat, 2015-2017 (Juta rupiah)

Jenis Bank/Jenis Simpanan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah	33 285 058	35 303 422	38 447 554
Bank Pemerintah *)	24 884 943	26 753 240	29 176 689
Bank Swasta nasional	7 155 101	7 156 096	7 755 550
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1 245 014	1 394 086	1 515 315
Valuta Asing	1 044 401	998 648	1 111 481
Bank Pemerintah *)	656 788	627 496	724 492
Bank Swasta nasional	387 613	371 153	386 989
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	-	-	-
Rupiah Valuta Asing	34 329 459	36 302 070	39 559 035
Bank Pemerintah *)	25 541 731	27 380 735	29 901 181
Bank Swasta nasional	7 542 714	7 527 249	8 142 539
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1 245 014	1 394 086	1 515 315

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Keterangan : *)Mencakup Bank Pemerintah Daerah

6.2. Penghimpunan Dana Bank

Sampai keadaan tahun 2017 perbankan di Sumatera Barat selalu

mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana masyarakat. Pada

tahun 2016 tercatat 36,30 triliun rupiah dana masyarakat dihimpun bank, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing. Selanjutnya pada tahun 2017 bank berhasil menghimpun dana masyarakat sebanyak 39,56 triliun rupiah, yang berarti terjadi peningkatan penghimpunan dana masyarakat sebesar 8,97 persen.

Simpanan masyarakat Sumatera Barat di bank dalam bentuk rupiah masih lebih dominan dibanding bentuk valuta asing. Pada tahun 2017 simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah masih lebih dominan dibanding bentuk valuta asing. Pada tahun 2017 simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah mencapai 38,45 triliun rupiah atau 97,19 persen dari total simpanan. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk rupiah lebih banyak terdapat pada bank pemerintah, diikuti oleh bank swasta nasional dan BPR. Pada tahun 2017 bank pemerintah mengumpulkan dana masyarakat sebesar 29,18 triliun rupiah atau 75,89 persen dari total dana masyarakat dalam bentuk rupiah, sedangkan bank swasta nasional dan BPR masing-masingnya sebesar 7,75 triliun rupiah dan 1,51 triliun rupiah.

Secara total penghimpunan dana masyarakat oleh bank dalam bentuk valuta asing di tahun 2017 berjumlah 1,11 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 tercatat 998 miliar rupiah simpanan masyarakat dalam bentuk valuta asing.

Penghimpunan dana dalam bentuk valuta asing ini dilakukan oleh dua kelompok bank, yaitu bank pemerintah dan bank swasta nasional, sedangkan pada bank asing dan bank campuran serta bank BPR tidak ada pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk valuta asing.

Dalam penghimpunan bentuk valuta asing, bank pemerintah selalu lebih besar dibanding pada bank swasta nasional pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 bank pemerintah dan bank swasta nasional masing-masingnya menghimpun dana sebesar 627,50 miliar rupiah dan 371,15 miliar rupiah. Sementara itu pada tahun 2017 bank pemerintah dan bank swasta nasional menghimpun dana masyarakat masing-masingnya sebesar 724,49 miliar rupiah dan 386,99 miliar rupiah.

6.3. Posisi Kredit Perbankan

6.3.1 Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan

Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh pihak perbankan di Sumatera Barat juga diiringi oleh peningkatan pemberian kredit. Secara total, pinjaman yang diberikan perbankan dalam bentuk rupiah dan valuta asing di tahun 2017 meningkat jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2015-2017 terlihat trend yang meningkat dalam pemberian pinjaman, pada tahun 2015 mencapai 49,15 triliun rupiah, pada tahun 2016 meningkat menjadi 51,92 triliun rupiah, dan selanjutnya pada tahun 2017 mencapai 55,58 triliun rupiah.

Bila dilihat menurut jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, kredit yang paling banyak dimanfaatkan tergolong pada penggunaan untuk konsumsi. Tercatat pada tahun 2017 sebesar 24,87 triliun rupiah merupakan pinjaman untuk konsumsi atau sebesar 44,74 persen dari total pinjaman yang diberikan oleh bank. Pada urutan berikutnya adalah untuk modal kerja sebesar 19,13 triliun rupiah. Penggunaan

untuk investasi merupakan jenis penggunaan yang paling sedikit, yaitu senilai 11,58 triliun rupiah. Ketiga jenis penggunaan pinjaman yang disalurkan bank ini juga memiliki trend meningkat selama periode 2015-2017.

Seperti halnya pada penghimpunan dana masyarakat, pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk rupiah lebih besar dibanding yang berbentuk valuta asing. Pada tahun 2017 pinjaman yang diberikan bank yang berbentuk rupiah adalah sebesar 53,90 triliun rupiah, sedangkan untuk pinjaman yang berbentuk valuta asing sebesar 1,68 triliun rupiah.

Peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan bank bila dilihat berdasarkan bentuk pinjaman mengalami peningkatan pada kredit rupiah namun sebaliknya pada kredit valuta asing. Jumlah pinjaman dalam bentuk rupiah meningkat mulai dari 50,24 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 53,90 triliun rupiah di tahun 2017. Tidak demikian untuk pinjaman dalam bentuk valuta asing, pinjaman untuk valuta asing menurun dari 1,681 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 1,678 triliun rupiah di tahun 2017.

Pinjaman dalam bentuk rupiah banyak digunakan untuk konsumsi, sedangkan pinjaman valuta asing lebih banyak digunakan untuk modal kerja.

Peningkatan pemberian kredit dalam bentuk rupiah selama tahun 2015-2017 terjadi pada modal kerja, investasi, dan konsumsi. Pemberian kredit yang digunakan untuk konsumsi merupakan yang terbesar dibanding yang lainnya. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 24,87 triliun rupiah pinjaman

untuk konsumsi dalam bentuk rupiah, meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 22,93 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2016 pinjaman rupiah untuk modal kerja adalah sebesar 16,81 triliun rupiah, pada tahun 2017 meningkat menjadi 17,77 triliun rupiah.

Pinjaman rupiah untuk investasi meningkat dari 10,50 triliun pada tahun 2016 menjadi 11,27 triliun rupiah di tahun 2017.

Tabel 6.3.1
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan di Sumatera Barat 2015-2017 (Juta rupiah)

Rincian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah	47 271 885	50 241 992	53 903 968
1. Modal Kerja	16 476 591	16 809 606	17 771 045
2. Investasi	9 616 176	10 504 904	11 266 752
3. Konsumsi	21 179 118	22 927 482	24 866 171
Valuta Asing	1 879 848	1 681 495	1 678 083
1. Modal Kerja	1 358 212	1 246 589	1 359 963
2. Investasi	521 636	434 390	317 713
3. Konsumsi	-	515	407
Jumlah	49 151 732	51 923 487	55 582 050
1. Modal Kerja	17 834 803	18 056 195	19 131 008
2. Investasi	10 137 812	10 939 295	11 584 464
3. Konsumsi	21 179 118	22 927 997	24 866 578

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Peningkatan pemberian kredit dalam bentuk valuta asing selama

tahun 2016 terjadi pada modal kerja. Penggunaan untuk investasi dan konsumsi mengalami penurunan. Pemberian kredit yang digunakan untuk modal kerja merupakan yang terbesar dibanding yang lainnya. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 1,36 triliun rupiah pinjaman untuk modal kerja dalam bentuk valuta asing, meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 1,25 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2016 pinjaman valuta asing untuk investasi adalah sebesar 434,39 miliar rupiah. Jumlah ini menurun pada tahun 2016 menjadi 317,71 milyar rupiah. Pada tahun 2015 tidak ada pinjaman valuta asing untuk konsumsi, pada tahun 2017 meningkat menjadi 407 juta rupiah.

6.3.2. Posisi Kredit menurut Kelompok Bank

Penggunaan kredit untuk UMKM dikelompokkan atas tiga, yaitu untuk modal kerja, investasi, dan yang tidak teridentifikasi. Kredit yang telah disalurkan oleh pihak perbankan Sumatera Barat kepada UMKM pada tahun 2017 tercatat sebesar 14,86 triliun rupiah. Kondisi tahun tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat

sebesar 14,12 triliun rupiah. Pinjaman untuk UMKM ini penggunaannya hanya untuk dua jenis, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Penggunaan terbesar di tahun 2017 berasal dari kredit yang diberikan bank di Sumatera Barat untuk modal kerja (11,85 triliun rupiah) yang diikuti oleh untuk investasi sebesar 3,01 triliun rupiah.

Kredit untuk UMKM yang diberikan perbankan di Sumatera Barat sebagian besar disalurkan melalui bank pemerintah. Pada tahun 2017 sebanyak 12,65 triliun rupiah kredit dikucurkan untuk UMKM atau sekitar 85,09 persen dari total kredit UMKM. Sebagian besar kredit dari bank pemerintah itu digunakan untuk modal kerja yang mencapai 10,52 triliun rupiah, sisanya adalah untuk investasi sebesar 2,13 triliun rupiah.

Bank swasta nasional di Sumatera Barat memberikan kredit kepada UMKM dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding bank pemerintah dengan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Kredit bank swasta kepada UMKM di tahun 2015 adalah 2,47 triliun rupiah, sementara itu pada tahun 2017 tercatat kredit untuk UMKM menurun menjadi

sebesar 2,20 triliun rupiah kredit telah disalurkan oleh bank swasta nasional.

Sama halnya dengan penyaluran kredit oleh bank pemerintah, pada bank swasta nasional penggunaan kredit UMKM terbanyak juga untuk modal kerja. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 1,34 triliun rupiah kredit UMKM untuk modal kerja dikucurkan bank swasta nasional, sedangkan untuk investasi sebesar 866,74 miliar rupiah.

Bank asing dan bank campuran menyalurkan kredit perbankan kepada usaha kecil, mikro

dan menengah dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding kelompok bank pemerintah dan bank swasta nasional. Pada tahun 2017 bank asing dan bank campuran telah menyalurkan kredit sebesar 12,73 miliar rupiah. Penggunaan terbesar yang berasal dari sini adalah untuk investasi sebesar 12,35 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kredit untuk modal kerja mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi 379 juta rupiah.

Tabel 6.3.2
Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Diberikan menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat 2015-2017 (juta rupiah)

Rincian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Bank Pemerintah	11 171 499	11 953 895	12 647 391
1. Modal Kerja	9 242 832	9 752 198	10 517 039
2. Investasi	1 928 668	2 201 697	2 130 351
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
II. Bank Swasta Nasional	2 469 779	2 170 637	2 202 755
1. Modal Kerja	1 364 238	1 258 997	1 336 016
2. Investasi	1 105 541	911 640	866 739
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
III. Bank Asing dan Bank Campuran	2 536	402	12 728
1. Modal Kerja	1 658	402	379
2. Investasi	878	-	12 349
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah	13 643 814	14 124 935	14 862 873
1. Modal Kerja	10 608 728	11 011 597	11 853 434
2. Investasi	3 035 087	3 113 337	3 009 440
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

6.3.3. Posisi Kredit menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan lapangan usaha yang

mendapat alokasi kredit terbesar yang diberikan perbankan di Sumatera Barat.

Tabel 6.3.3
Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Lapangan Usaha di Sumatera Barat, 2016-2017 (juta rupiah)

Sektor Ekonomi	Rupiah dan Valas		Rupiah	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	28 995 490	30 715 472	27 314 510	29 037 796
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1 293 972	1 444 334	1 293 972	1 444 334
Pertambangan dan Penggalian	289 300	276 270	266 824	276 151
Industri Pengolahan	6 646 204	5 569 750	5 218 825	3 995 162
Pengadaan Listrik Dan Gas	165 881	291 865	165 881	291 865
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	12 060	10 482	12 060	10 482
Konstruksi	814 938	698 038	814 938	698 038
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	12 802 269	13 124 681	12 786 110	13 107 744
Transportasi Dan Pergudangan	385 472	535 582	385 472	535 582
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1 071 068	1 025 747	1 071 068	1 025 747
Informasi Dan Komunikasi	54 686	53 056	54 686	53 056
Jasa Keuangan Dan Asuransi	404 832	332 329	404 832	332 329
Real Estate	173 243	162 119	173 243	162 119
Jasa Perusahaan	281 431	267 817	281 431	267 817
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	6 530	6 277	6 530	6 277
Jasa Pendidikan	114 780	102 452	114 780	102 452
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	193 738	210 810	193 738	210 810
Jasa Lainnya	4 285 084	6 603 865	4 070 118	6 517 833
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	22 927 997	24 866 578	22 927 482	24 866 171
Rumah Tinggal	2 919 011	3 256 716	2 919 011	3 256 716
Flat dan Apartemen	63 464	41 977	63 464	41 977
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	258 003	224 403	258 003	224 403
Kendaraan Bermotor	1 804 726	1 847 499	1 804 726	1 847 499
Lainnya	17 882 794	19 495 983	17 882 279	19 495 576
Jumlah	51 923 487	55 582 050	50 241 992	53 903 968

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Sektor yang memberikan sumbangan PDRB sebesar 15,05 persen ini mendapatkan kredit perbankan lebih besar dibanding sektor lain. Pada tahun 2017 kredit berupa rupiah dan valuta asing yang diperoleh sektor perdagangan ini adalah sebesar 13,12 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016. Kredit yang diterima pada sektor perdagangan di tahun 2016 adalah sebesar 12,80 triliun rupiah.

Lapangan usaha lainnya yang menyerap kredit perbankan dalam jumlah yang juga relatif besar adalah lapangan usaha jasa lainnya. Pada tahun 2017 sektor ini mendapat kredit perbankan sebesar 6,60 triliun rupiah. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 4,28 triliun rupiah.

Lapangan usaha yang paling kecil menyerap kredit perbankan di Sumatera Barat adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor ini merupakan yang terendah baik pada tahun 2016 maupun pada tahun 2017.

Pinjaman kepada bukan lapangan usaha yang diberikan pihak bank paling ternyata digunakan untuk kredit rumah tinggal, diikuti oleh

kredit untuk kendaraan bermotor. Pinjaman yang diberikan untuk kredit rumah mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016, begitu juga dengan pinjaman yang diberikan untuk kredit kendaraan bermotor. Pada tahun 2016 kredit rumah tinggal tercatat sebesar 2,92 triliun rupiah, dan pada tahun 2017 menjadi 3,26 triliun rupiah. Kredit untuk kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 1,80 triliun rupiah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,85 triliun rupiah.

6.3.4. Posisi Kredit menurut Sektor Ekonomi

Sektor yang paling besar melakukan pinjaman ke bank di Sumatera Barat untuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Total kredit yang diterima usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tahun 2017 tercatat sebesar 14,86 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,12 triliun rupiah. Dari total tersebut sebanyak 9,29 triliun rupiah atau

62,49 persen dari total kredit berhasil diserap oleh sektor tersebut.

Dalam hal penyerapan kredit UMKM terdapat kondisi yang belum menggembirakan pada sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan. Sektor yang merupakan tumpuan sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat ternyata belum banyak bisa menyerap kredit dari perbankan. Pada tahun 2017 UMKM sektor ini hanya menerima kredit dari bank sebesar 969,50 miliar rupiah. Ini

berarti kredit sektor pertanian untuk usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah hanya 6,52 persen dari kredit yang diterima UMKM secara keseluruhan. Namun dibanding tahun 2016, kredit yang diberikan pada sektor pertanian tersebut sudah mengalami peningkatan. Pada tahun tersebut tercatat 837,22 miliar rupiah disalurkan untuk UMKM sektor pertanian atau sekitar 5,93 persen dari keseluruhan kredit UMKM.

Tabel 6.3.4
Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2016-2017 (juta rupiah)

Sektor	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	837 216	969 505
Pertambangan dan Penggalian	69 538	73 181
Industri Pengolahan	578 497	795 487
Pengadaan Listrik Dan Gas	10 412	10 416
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	10 400	8 616
Konstruksi	508 064	520 379
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	9 342 955	9 287 218
Transportasi Dan Pergudangan	292 263	340 077
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	325 882	326 854
Informasi Dan Komunikasi	36 122	35 013
Jasa Keuangan Dan Asuransi	244 973	203 734
Real Estate	30 145	39 815
Jasa Perusahaan	194 839	204 422
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1 165	24
Jasa Pendidikan	59 849	43 337
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	42 982	45 443
Jasa Lainnya	1 539 633	1 959 352
Jumlah	14 124 935	14 862 873

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia



PENDUDUK



**PENDUDUK MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**



PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



**PENDUDUK BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA UTAMA**



KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kependudukan merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Data kependudukan dengan berbagai karakteristiknya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah perencanaan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu daerah atau negara dapat diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk.

Pertambahan penduduk secara tidak langsung akan menimbulkan

efek, baik efek positif maupun negatif. Dari sisi negatif, bertambahnya penduduk akan menghambat pembangunan karena semakin besar jumlah penduduk, maka pendapatan perkapita masyarakat suatu daerah akan semakin kecil dan juga menambah masalah sosial ketenagakerjaan (masalah perumahan, kriminalitas, lapangan pekerjaan dan lain-lain). Dari sisi positif, bertambahnya penduduk akan memacu pembangunan karena kegiatan produksi akan terus berlangsung berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang yang dihasilkan. Konsumsi dari barang-barang tersebut yang nantinya akan memacu kegiatan ekonomi dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.

Tidak semua penduduk dapat berperan sebagai pemacu pembangunan. Dalam membangun suatu daerah diperlukan sumber daya manusia yang andal atau mempunyai kemampuan/*skill* yang tinggi. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kemampuan yang

memadai hanya akan menambah permasalahan ketenagakerjaan.

Setiap tahunnya jumlah penduduk Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Walaupun setiap tahun penduduk bertambah, namun laju pertumbuhan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010) didapatkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk sudah mencapai 4.865.331 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk di tahun 2010 ini merupakan rata-rata laju pertumbuhan pertahun periode tahun 2000-2010. Selanjutnya pada tahun 2011 penduduk Sumatera Barat mencapai 4.933.112 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,39 persen dan ini merupakan laju pertumbuhan terbesar pada periode 2010-2017. Pada tahun 2012 penduduk Sumatera Barat sudah tercatat sebanyak 5.000.184 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,36 persen. Pada tahun 2013 penduduk Sumatera Barat terdapat sebanyak 5.066.476 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,33 persen.

Pada tahun 2014, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.131.882 orang dan laju pertumbuhan yang semakin menurun yaitu sebesar 1,29 persen. Pada tahun 2015, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.196.289 orang dengan laju pertumbuhan 1,26 persen. Pada tahun 2016, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 orang dengan laju pertumbuhan 1,22 persen. Pada akhir periode atau pada tahun 2017, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.321.489 orang dengan laju pertumbuhan 1,18 persen.

Dibanding dengan keadaan pada awal periode data atau pada tahun 2010 telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 330.958 jiwa atau selama lima tahun ini terjadi pertambahan penduduk sebanyak 6,80 persen atau rata-rata 1,32 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 255,46 juta jiwa, atau merupakan yang keempat terbesar dunia. Sementara itu penduduk Sumatera Barat pada tahun tersebut merupakan 2,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Tabel 7.0.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2010–2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	4 865 331	1,34*
2011	4 933 112	1,39
2012	5 000 184	1,36
2013	5 066 476	1,33
2014	5 131 882	1,29
2015	5 196 289	1,26
2016	5 259 528	1,22
2017	5 321 489	1,18

Ket : * Rata-rata laju pertumbuhan pertahun 2000 - 2010

Sumber : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Selain karena adanya kelahiran dan kematian, perubahan penduduk Sumatera Barat akibat perpindahan penduduk keluar ataupun masuk wilayah Sumatera Barat cukup besar pengaruhnya dalam pertumbuhan penduduk. Hal ini akibat faktor kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Selanjutnya juga dengan adanya beberapa sekolah/ perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat dari luar Sumatera Barat akan mendorong bertambahnya penduduk di Sumatera Barat

7.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2017 di Sumatera Barat terdapat 2.649.595 jiwa penduduk laki-laki dan 2.671.890 jiwa penduduk perempuan. Dari keadaan ini terlihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dan secara persentase pada tahun tersebut terdapat 49,79 persen penduduk laki-laki dan 50,21 persen penduduk perempuan atau ratio antara penduduk

laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 99,05.

Komposisi penduduk Sumatera Barat ditinjau menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3.430.882 jiwa atau 64,47 persen dari total penduduk merupakan penduduk berusia 15-64 tahun. Kelompok umur 15-64 tahun merupakan kelompok usia produktif, sehingga dengan besarnya kelompok umur ini berakibat pada besarnya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang utama adalah perlunya kebutuhan pendidikan dan lapangan kerja yang besar.

Kebiasaan merantau yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau memberi dampak pada kelompok umur 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas di provinsi Sumatera Barat, yang menyebabkan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 15-64 tahun jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 1.707.879 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.722.999 jiwa.

Kondisi yang berbeda ditemui pada kelompok umur 0-14 tahun, penduduk laki-laki pada usia tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Secara umum diketahui bahwa di dunia memang kelahiran bayi laki-laki lebih besar dibanding bayi perempuan. Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 penduduk laki-laki pada kelompok umur 0-14 tahun tercatat sebanyak 810.214 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 778.698 jiwa. Secara total kelompok umur 0-14 tahun ini berjumlah 1.588.912 jiwa atau merupakan 29,86 persen dari keseluruhan penduduk Sumatera Barat.

Kelompok umur 65 tahun ke atas merupakan kelompok umur yang paling kecil jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Pada tahun 2017 kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 301.695 jiwa. Namun dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan berjumlah 170.193 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 131.502 jiwa.

Tabel 7.1.1

Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	810 214	30,58	778 698	29,14	1 588 912	29,86
15 – 64	1 707 879	64,46	1 722 999	64,49	3 430 882	64,47
65+	131 502	4,96	170 193	6,37	301 695	5,67
Jumlah	2 649 595	100,00	2 671 890	100,00	5 321 489	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.2. Pendidikan

Sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk Sumatera Barat masih belum terlalu baik. Hal ini dibuktikan dengan masih cukup besarnya persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah ataupun hanya memiliki ijazah pendidikan dasar, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi jumlahnya masih jauh lebih kecil. Dewasa ini sampai dengan keadaan tahun 2017 kondisi tersebut masih tetap sama.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mendapatkan bahwa pada tahun 2017 penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah mencapai 19,05 persen. Penduduk yang mempunyai ijazah setingkat Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 20,27 persen. Untuk tingkat sekolah menengah, penduduk yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) lebih sedikit dibanding yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), masing-masingnya adalah 21,89 persen dan 28,36 persen. Dan penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II/III dan Diploma IV sampai S3 tercatat 2,82 persen dan 7,62 persen.

Tabel 7.2.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2015 – 2017 (persen)

Ijazah yang Dimiliki	2015			2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk Punya	19,80	21,28	20,55	17,38	19,59	18,50	17,58	20,48	19,05
SD/MI	22,02	19,93	20,96	25,86	22,26	24,03	21,96	18,63	20,27
SMTp	22,22	20,51	21,35	16,35	18,42	17,40	22,51	21,29	21,89
SMTA	27,79	26,45	27,11	32,04	28,07	30,02	29,86	26,91	28,36
Dipl I/II/III	2,14	4,35	3,27	1,94	3,34	2,65	1,85	3,74	2,82
DIV sd S3	6,03	7,48	6,76	6,42	8,31	7,38	6,24	8,95	7,62
Jumlah	100,00								

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Dewasa ini permasalahan gender masih merupakan masalah yang menjadi perhatian, baik di Indonesia khususnya maupun di dunia. Masih banyak anak tidak bisa bersekolah hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun di Sumatera Barat ternyata tidak demikian, karena tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara tingkat pendidikan penduduk laki-laki dengan perempuan. Perempuan di daerah ini diberi kesempatan yang

sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu, bahkan ternyata melebihi dari kaum laki-laki. Seperti ditemui sampai tingkat pendidikan tinggi, pada tahun 2017 sebanyak 6,24 persen penduduk laki-laki mempunyai ijazah pendidikan pada tingkat DIV sampai dengan S3, sedangkan pada penduduk perempuan terdapat 8,95 persen pada tingkat pendidikan yang sama. Demikian juga untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III ternyata penduduk perempuan lebih banyak memiliki ijazah pada

jenjang pendidikan tersebut dibanding penduduk laki-laki, yaitu masing-masingnya sebesar 3,74 dan 1,85 persen.

7.3. Ketenagakerjaan

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mencatat bahwa pada tahun 2017 di Sumatera Barat terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 3.735,43 ribu orang. Penduduk usia 15 tahun ke atas ini dibedakan atas dua, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang memerlukan lapangan kerja. Tidak semua penduduk usia kerja tergolong ke dalam angkatan kerja. Ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa yang usianya 15 tahun ke atas tidak tergolong angkatan kerja. Dari Tabel 7.3.1 dan 7.3.2 diketahui bahwa jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja lebih banyak dibanding dengan yang bukan angkatan kerja.

Pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat penduduk yang termasuk pada angkatan kerja adalah

sebanyak 2.476,60 ribu jiwa, atau 66,29 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Secara berturut-turut di tahun 2015 dan 2016 jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja sebanyak 2.346,16 ribu jiwa dan 2.473,81 ribu jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2017 terdapat 1.429,24 ribu penduduk laki-laki atau merupakan 80,04 persen dari penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang termasuk pada angkatan kerja, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.002,1 ribu orang atau 52,92 persen dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas.

Bila dirinci lebih detail, angkatan kerja dikelompokkan atas penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja di tahun 2017 tercatat sebanyak 2.359,54 ribu orang atau 62,59 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk pada kelompok

pengangguran di Sumatera Barat sebesar 127,67 ribu orang atau 3,70 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya, persentase pengangguran tersebut menurun begitu juga jumlahnya. Pada tahun 2016 banyaknya penduduk yang menganggur sebesar 125,90 ribu orang atau 3,41 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Masalah pengangguran perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Jumlah pengangguran yang besar akan

menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan, karena angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kriminalitas. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, antara lain ditandai oleh jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

Tabel. 7.3.1

Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 – 2017 (persen)

Kegiatan	2015			2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	79,63	49,97	65,56	81,10	53,48	67,08	80,04	52,92	66,29
Bekerja	74,31	46,37	60,11	77,10	50,63	63,67	76,67	49,48	62,59
Pengangguran	5,32	3,60	4,45	4,00	2,85	3,41	3,97	3,44	3,70
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	20,37	50,03	35,44	18,90	46,52	32,92	19,97	47,07	37,71
Sekolah	10,99	11,83	11,42	9,31	10,22	9,77	11,24	11,09	11,17
Mengurus RT	1,93	34,54	18,50	3,21	33,77	18,72	3,37	33,16	18,49
Lainnya	7,45	3,65	5,52	6,39	2,53	4,43	5,3	2,18	4,06
Jumlah	100,00								

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Kondisi yang sama dengan kelompok angkatan kerja terjadi pada penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, yaitu pada tahun 2017 memiliki jumlah lebih sedikit dibanding tahun 2016, namun secara persentase juga menurun. Pada tahun 2016 penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah 1.217,30 ribu orang atau sebesar 37,71 persen. Pada kelompok bukan angkatan kerja penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2017 terdapat 873,11 ribu penduduk

perempuan yang termasuk pada kelompok bukan angkatan kerja. Sebagian besar kegiatan penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja ini adalah mengurus rumahtangga yang mencapai jumlah 641,17 ribu orang. Sementara itu penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bersekolah adalah sebanyak 196,77 ribu orang dan kegiatan lainnya sebanyak 49,22 ribu orang. Sedangkan penduduk laki-laki yang termasuk bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 353,34 ribu orang,

Tabel 7.3.2

Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 – 2017 (000 orang)

Kegiatan	2015			2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	1 423,20	922,96	2 346,16	1 472,55	1 001,26	2 473,81	1 429,24	1 002,1	2 476,60
Bekerja	1 328,15	856,45	2 184,60	1 399,96	947,95	2 347,91	1 143,63	962,92	2 359,54
Pengangguran	95,05	66,52	161,56	72,59	53,31	125,90	75,02	56,22	127,67
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	364,07	924,00	1 228,07	343,24	871,08	1 214,32	353,34	873,11	1 217,30
Sekolah	196,38	218,58	414,95	168,96	191,30	360,26	158,76	196,77	363,31
Mengurus RT	34,56	637,92	672,48	58,29	632,39	690,68	58,88	641,17	635,62
Lainnya	133,14	67,50	200,63	115,99	47,39	163,38	112,77	49,32	164,83
Jumlah	1 787,28	1 846,96	3 634,24	1 815,79	1 872,34	3 688,13	1 832,79	1 894,34	3 735,43

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

dengan rincian kegiatan 158,76 ribu orang sekolah, 58,88 ribu orang mengurus rumahtangga dan 112,77 ribu orang melakukan kegiatan lainnya.

7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Hasil Sakernas tahun 2017 mencatat bahwa penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat berjumlah 2.363.490 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2016 penduduk bekerja sudah berjumlah sebanyak 2.347.911 orang.

Sektor Pertanian masih merupakan sektor utama bagi penduduk Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendu-

duk yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Walaupun saat ini peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat makin berkurang, sektor ini masih merupakan yang dominan dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, gas, dan air minum.

Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2017 terdapat 863.643 orang (37,12 persen) yang bekerja di sektor pertanian, dan sementara itu pada tahun 2016 terdapat 855.583 orang (36,44 persen) di sektor pertanian.

Tabel 7.4.1
Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama
di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Lapangan Usaha	2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	855 583	36,44	863 643	36,54
2. Pertambangan dan Penggalian	63 930	2,72	64 132	2,71
3. Industri Pengolahan	206 057	8,78	208 023	8,81
4. Listrik, Gas dan Air Minum	11 041	0,47	11 089	0,47
5. Bangunan	115 233	4,91	116 314	4,92
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	517 570	22,04	518 312	21,93
7. Pengangkutan dan Komunikasi	104 121	4,44	106 141	4,49
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	59 492	2,53	60 472	2,56
9. Jasa Kemasyarakatan	414 884	17,67	415 364	17,57
Jumlah	2 347 911	100,00	2 363 490	100,00

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Selain Sektor Pertanian, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa Kemasyarakatan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2017 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 518.321 orang (21,93 persen). Tenaga kerja pada sektor tersebut lebih banyak dibanding tahun 2016 yang berjumlah 517.570 orang (22,40 persen). Sementara itu pada tahun 2017 sektor jasa kemasyarakatan

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 415.364 orang (17,57 persen), sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebesar 414.488 orang (17,67 persen). Sektor industri pengolahan yang diharapkan sebagai sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja yang banyak mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 mampu menyerap 208.023 orang yang bekerja di sektor industri pengolahan atau 8,81 persen dari total tenaga kerja, meningkat bila

dibandingkan tahun 2016 yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 206.057 orang atau hanya 8,87 persen dari penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas.

7.5. Kesejahteraan Masyarakat

7.5.1. Pola Konsumsi Masyarakat

Salah satu ukuran untuk menentukan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan makin besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat sampai saat ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan

masih lebih besar dibanding non makanan. Pada tahun 2017 pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat mencapai angka 996.077 rupiah. Sementara itu pada tahun 2016 pengeluaran rata-rata per kapita sedikit lebih rendah yaitu sebesar 985.025 rupiah.

Berdasarkan jenisnya, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat tahun 2017 terdiri dari 547.432 rupiah merupakan pengeluaran untuk makanan dan 448.645 rupiah adalah pengeluaran untuk non makanan. Di tahun 2016 pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan adalah sebesar 537.236 rupiah dan non makanan sebesar 447.789 rupiah.

Tabel 7.5.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat,
Tahun 2015 - 2017

Jenis Pengeluaran	2015		2016		2017	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	472 428	52,80	537 236	54,54	547 432	54,96
Non Makanan	422 275	47,20	447 789	45,46	448 645	45,04
Jumlah Pengeluaran	894 703	100,00	985 025	100,00	996 077	100,00

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Sumatera Barat diikuti peningkatan perbandingan persentase antara pengeluaran untuk makanan dan penurunan persentase antara pengeluaran untuk non makanan pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2017 pengeluaran per kapita untuk makanan adalah sebesar 54,96 persen dan non makanan sebesar 45,04 persen. Pada tahun 2016 pengeluaran untuk makanan sebanyak 54,54 persen sedangkan non makanan adalah 45,46 persen.

7.5.2. Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan

7.5.2.1 Pemerataan Pendapatan

Peningkatan pendapatan penduduk di suatu wilayah belum dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat jika peningkatan pendapatan itu belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di samping peningkatan pendapatan masih diperlukan pemerataan pembagian pendapatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu dengan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (Gini Rasio).

Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk dibagi atas tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Sementara itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Jika kelompok ini menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Namun, sebaliknya jika kelompok ini menerima antara 12 sampai dengan 17 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat

ketimpangannya dianggap sedang. Sementara itu jika kelompok ini menerima lebih dari 17 persen maka ketimpangan dianggap rendah.

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika indeks Gini menunjukkan angka kurang dari 0,30 maka pendapatan penduduk dikatakan cukup merata (ketimpangan rendah). Bila bernilai 0,30 sampai 0,50 berarti memiliki ketimpangan sedang, dan bila lebih dari 0,50 berarti memiliki ketimpangan tinggi.

Tabel 7.5.2.1
Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2017

Tahun	Distribusi Pengeluaran			Gini Rasio
	40 % rendah	40 % sedang	20 % tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	20,55	39,24	40,22	0,33
2011	26,15	40,08	33,77	0,33
2012	24,91	40,15	34,95	0,35
2013	25,07	37,65	37,28	0,34
2014	21,31	37,23	41,46	0,32
2015	20,50	36,18	43,33	0,34
2016	20,82	36,86	42,32	0,33
2017	21,02	37,21	43,53	0,35

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Dari Tabel 7.5.2.1. diketahui bahwa persentase pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap seluruh pengeluaran penduduk dari

tahun 2010 sampai tahun 2017 berada diatas 17 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat termasuk pada kriteria rendah.

Walaupun ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk kriteria rendah dengan angka yang berfluktuasi, namun mulai tahun 2014 terdapat kecenderungan bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah makin

memperoleh distribusi pendapatan yang makin mengecil dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan memperoleh bagian 21,02 persen namun hampir sama dengan kondisi tahun 2010 (20,55 persen). Padahal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah mencapai dikisaran 21,31 persen, dimana pada tahun 2013 kelompok 40 persen terendah mendapat distribusi pendapatan yang makin besar, yaitu 25,07 persen, dan pada tahun 2014 kembali berkurang menjadi 21,31 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 21,31 persen dan pada tahun 2015 kembali berkurang menjadi 20,50 persen. Pada tahun 2016 penduduk yang termasuk 40 persen terendah pendapatannya mendapat distribusi pendapatan yang semakin bertambah yaitu sebesar 20,82 persen.

Keadaan yang hampir sama juga ditemukan pada kelompok 40 persen yang mempunyai pendapatan sedang dan 20 persen berpendapatan tinggi yang cenderung berfluktuasi. Walaupun berfluktuasi, namun mulai tahun 2014 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen sedang

cenderung menunjukkan penurunan, sedangkan pada kelompok 20 persen tinggi justru semakin meningkat. Pada tahun 2014 distribusi pengeluaran pada kedua kelompok ini hampir sama, namun pada tahun 2015 distribusi pendapatan pada kelompok 40 persen sedang lebih kecil dibanding dengan kelompok 20 persen tinggi, yaitu masing-masingnya sebesar 36,18 dan 43,33 dan pada tahun 2016 distribusi pendapatan pada kelompok 40 persen sedang dengan kelompok 20 persen tinggi yaitu masing-masingnya sebesar 36,86 dan 42,32. Pada tahun 2017 distribusi pendapatan pada kelompok 40 persen sedang sedikit meningkat yaitu sebesar 37,21 dan distribusi pendapatan pada kelompok 20 persen tinggi naik menjadi 43,53 .

Berdasarkan pada indeks gini rasio selama tahun 2010-2017 ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk pada kriteria sedang. Walaupun masuk kriteria sedang, namun indeks gini rasio cenderung menunjukkan peningkatan. Peningkatan itu mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin

melebar. Pada tahun 2011 dan 2012 indeks gini berada pada angka 0,34. Pada tahun 2013 indeks ini mencapai yakni sebesar 0,34 dan sedikit menurun di tahun 2014 menjadi 0,32. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2015 mencapai angka 0,34, namun pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 0,33 dan sedikit naik pada tahun 2017 menjadi 0,35. Kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar kesenjangan pendapatan ini tidak makin melebar, karena kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas.

7.5.2.2. Penduduk Miskin

1) Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomis. Ukuran yang dipakai adalah dengan metode *Head Count Index*, yang merupakan kemiskinan absolut.

Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang

berada dibawah suatu batas yang disebut *garis kemiskinan*. Garis kemiskinan ini merupakan nilai dari (dua) komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

2) Garis Kemiskinan

Standar kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Begitu juga standar kemiskinan antara daerah perkotaan dengan perdesaan.

Perbedaan standar kemiskinan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perbedaan tingkat pendapatan, pola konsumsi maupun ketersediaan akan barang dan jasa. Tinggi rendahnya pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sedangkan pola konsumsi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya ketersediaan barang dan jasa. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka garis kemiskinan juga dibedakan antara garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan perdesaan.

Garis kemiskinan yang merupakan pembatas antara penduduk miskin dan yang tidak miskin di

Tabel 7.5.2.2

Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2012 – 2017
(rupiah/kapita/bulan)

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)	321 128	360 768	390 862	423 339	454 674	475 365
Perdesaan (D)	273 655	321 252	349 824	391 178	425 520	441 415
Perkotaan+Perdesaan (K + D)	292 052	336 606	365 827	403 947	438 075	455 797

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat garis kemiskinan sebesar 292.052 rupiah/kapita/bulan, dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 mencapai angka 455.797 rupiah/kapita/bulan.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, ternyata daerah perkotaan memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 475.365 rupiah/kapita/bulan, sedangkan di perdesaan sebesar 441.415 rupiah/kapita/bulan. Perkembangan garis

kemiskinan baik wilayah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang sama dengan garis kemiskinan secara umum, yaitu menunjukkan nilai yang selalu meningkat. Pada tahun 2012 garis kemiskinan perkotaan berada pada angka 321.128 rupiah/kapita/bulan, yang berarti pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan sebesar 48,03 persen, sedangkan di perdesaan pada tahun yang sama garis kemiskinan adalah 273.655 rupiah atau meningkat 61,30 persen di tahun 2017

3) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Selama periode tahun 2010-2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berfluktuasi, namun secara persentase selalu menunjukkan penurunan. Pada awal periode atau pada tahun 2010 tercatat penduduk miskin sebanyak 430,02 ribu jiwa dan tahun 2011 meningkat menjadi 444,77 ribu orang. Walaupun secara jumlah meningkat, namun penduduk miskin ini secara persentase dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2012 penduduk miskin makin berkurang, baik dalam jumlah maupun persentase. Pada tahun tersebut penduduk miskin Sumatera Barat tercatat sebanyak 401,52 ribu jiwa (8,00 persen) dari seluruh penduduk Sumatera Barat. Di tahun 2013 turun menjadi 384,08 ribu (7,56 persen) dan pada tahun 2014 makin menurun menjadi 354,74 ribu (6,89 persen). Tahun 2015 penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 349,53 ribu (6,71 persen) dan pada tahun 2016 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 376,51 ribu (7,14 persen).

Secara jumlah ataupun persentase penduduk miskin lebih

banyak terdapat di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Pada tahun 2016 terdapat 257,00 ribu penduduk miskin di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebanyak 119,51 ribu orang. Tahun 2017 terdapat 245,41 ribu penduduk miskin di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebanyak 114,59 ribu orang. Penduduk miskin di pedesaan ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 257 ribu orang. Kondisi serupa ditemui di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 119,51 ribu orang.

Lebih banyaknya penduduk miskin di pedesaan merupakan fenomena yang wajar terjadi, mengingat penduduk di pedesaan jumlahnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Disamping itu kondisi pedesaan yang cenderung lebih tertinggal dan pola hidup yang lebih sulit serta lapangan pekerjaan yang didominasi oleh sektor pertanian menjadikan penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dibanding perkotaan.

Tabel 7.5.2.3.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2010-2017

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan(D)		Perkotaan+Pedesaan	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	106,18	6,84	323,84	10,88	430,02	9,50
2011	145,99	7,61	298,78	9,85	444,77	8,99
2012	125,39	6,45	276,13	8,99	401,52	8,00
2013	126,02	6,38	258,06	8,30	384,08	7,56
2014	108,53	5,41	246,21	7,84	354,74	6,89
2015	118,48	5,73	231,05	7,35	349,53	6,71
2016	119,51	5,52	257,00	8,27	376,51	7,14
2017	114,59	5,11	245,41	7,94	359,99	6,75

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat



PENUTUP

<https://sumberops.go.id>

Kinerja perekonomian nasional membaik di tahun 2017 telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian Sumatera Barat. Perekonomian nasional meningkat dari 5,03 persen tahun 2016 menjadi 5,07 persen tahun 2017, dan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga meningkat dari 5,27 persen tahun 2016 menjadi 5,29 persen tahun 2017.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah sebesar 155,96 triliun rupiah. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat, dengan memberikan andil sebesar 23,55 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang berperan sebesar 15,05 persen, usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,64 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 9,71 persen dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat.

Lapangan Jasa Pendidikan memberikan kontribusi laju pertumbuhan paling cepat diantara semua lapangan usaha dan mampu tumbuh sebesar 9,94 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan Minum laju pertumbuhannya sebesar 8,76 persen. Sedangkan yang memiliki laju pertumbuhan paling kecil adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan laju sebesar 1,13 persen.

Dilihat dari sisi permintaan keadaannya masih sama dengan tahun lalu, dimana motor penggerak utama perekonomian di tahun 2017 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan memberikan kontribusi sebesar 52,05 persen pada pembentukan PDRB Sumatera Barat dari sisi penggunaan. Kontributor kedua adalah komponen pembentukan modal tetap bruto dengan andil sebesar 29,93 persen dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 12,68 persen. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama tahun 2017 mengalami kenaikan 7,95 persen

dari 37,35 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 40,32 juta rupiah di tahun 2017. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan pada PDRB per kapita tersebut.

Pada tahun 2017 inflasi menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut inflasi hanya tercatat sebesar 2,11 persen sedangkan di tahun 2016 inflasi mencapai sebesar 5,02 persen. Rendahnya angka inflasi menunjukkan selama tahun 2017 stabilitas ekonomi makro cukup terjaga.

Perkembangan nilai ekspor Sumatera Barat cukup menggembirakan di tahun 2017 karena kinerja ekspor meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tercatat ekspor sudah mencapai US\$1,71 miliar, sedangkan pada tahun 2017 ekspor bertambah menjadi US\$2,05 miliar.

Komoditi ekspor utama Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 masih tetap dipegang oleh ekspor hasil industri yang mampu menyumbang sebesar US\$1,99 miliar

atau 97,16 persen dari keseluruhan nilai ekspor. Nilai ekspor tersebut meningkat dibanding tahun 2016 yaitu sebesar US\$1,66 miliar (97,17 persen dari total ekspor). Sedangkan tiga negara tujuan ekspor utama Sumatera Barat adalah India, Amerika Serikat dan Singapura.

Sementara itu nilai impor Sumatera Barat pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2016 impor mencapai nilai US\$0,35 miliar, sedangkan di tahun 2017 impor meningkat menjadi US\$0,45 miliar. Pelabuhan Teluk Bayur tercatat sebagai pelabuhan utama sebagai tempat masuknya arus barang-barang ke Sumatera Barat. Pada tahun 2017 senilai US\$443,07 juta, barang diimpor melalui pelabuhan ini. Komoditi dengan nilai tertinggi yang diimpor ke Sumatera Barat adalah golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya dengan jumlah impor sebanyak 663,63 ribu ton atau meningkat 10,17 persen dibanding tahun 2016.

Neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor lebih besar daripada kinerja impor. Selama periode 2013-2017 walaupun neraca perdagangan surplus tetapi nilainya tetap berfluktuasi. Pada tahun 2013 neraca perdagangan Sumatera Barat senilai US\$1,17 miliar sedangkan di tahun 2014 surplus perdagangan menurun menjadi US\$1,07 miliar. Pada tahun 2015 neraca perdagangan mengalami peningkatan menjadi sebesar US\$1,12 miliar. Setelah itu peningkatan terjadi berlanjut di tahun 2016 dengan neraca perdagangan sebesar US\$1,36 miliar dan tahun 2017 nilainya meningkat lagi menjadi US\$1,60 miliar.

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun 2016, pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,76 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 4,62 triliun rupiah. Jika dibandingkan antara total penerimaan dengan total pengeluaran, total penerimaan di tahun 2017 lebih tinggi dari pada total pengeluaran yang mencapai 4,50 triliun rupiah.

Kota Padang merupakan daerah yang memiliki APBD paling besar. Pada tahun 2017 penerimaan daerah di kota Padang dalam APBD mencapai 2,09 triliun rupiah. Hal ini dimungkinkan karena sebagai ibukota provinsi penerimaan PAD daerah ini paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, yaitu PAD Padang di tahun tersebut mencapai 548,33 milyar rupiah.

Selama tahun 2017 kondisi perbankan masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini direfleksikan oleh meningkatnya kredit dan permodalan bank, meskipun kondisi stabilitas makro ekonomi menghadapi tantangan yang berat akibat dari krisis finansial global. Pada tahun tersebut di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 104 bank dengan kantor bank sebanyak 596 buah. Jumlah bank tersebut berkurang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik jumlah bank maupun kantor bank.

Penduduk Sumatera Barat sampai saat ini selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Pada awal periode atau pada tahun 2010 jumlah

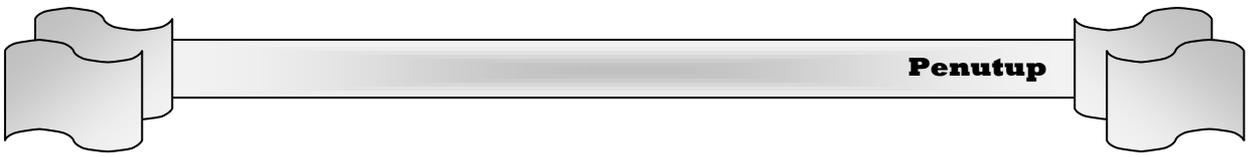
penduduk adalah sebanyak 4.865.331 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,34 persen pertahun periode 2000-2010. Di tahun 2017 jumlah penduduk telah mencapai 5.321.489 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,18 persen.

Dilihat menurut jenis kelamin, di Sumatera Barat penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2017 terdapat 2.649.595 laki-laki dan 2.671.890 perempuan. Sedangkan menurut kelompok umur, di Sumatera Barat penduduk usia 15-64 tahun masih merupakan yang terbanyak jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Di tahun itu terdapat 3.430.882 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 64,47 persen dari total penduduk.

Tingkat pendidikan di Sumatera Barat masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki ijazah (19,05 persen) dan yang hanya mempunyai ijazah setingkat SD/MI (20,27 persen).

Penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas di tahun 2017 berjumlah 3.735,43 ribu jiwa, yang termasuk angkatan kerja adalah 2.476,60 ribu jiwa dan yang bekerja berjumlah 2.359,54 ribu jiwa dan sisanya 127,67 orang adalah pengangguran. Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor utama bagi penduduk Sumatera Barat. Pada tahun 2017 sebanyak 36,54 persen penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas berada di sektor pertanian.

Garis kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2017 tercatat sebesar 455.797 rupiah. Garis kemiskinan ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 438.075 rupiah. Sementara itu jumlah penduduk miskin secara jumlah maupun persentase makin menurun tahun 2017. Pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah 430,02 ribu orang namun di tahun 2011 meningkat menjadi 444,770 ribu orang, sedangkan pada tahun 2012 berkurang menjadi 401,521 ribu orang dan terus berkurang menjadi 349,53 ribu jiwa tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat



jadi 376,51 ribu orang dan persentasenya meningkat menjadi 7,14 persen. Pada tahun 2017 jumlah

penduduk miskin menurun menjadi 359,99 ribu dan secara persentase turun menjadi 6,75 persen.

<https://sumbar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25135
Telp. 442158, 442159 Fax. 442161
E-mail : sumbar@bps.go.id
Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

